

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini yang berjudul **“TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Tersusunya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, September 2018

Penulis,

**TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
(Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)**

ABSTRAK

Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa waris, mengedepankan musyawarah sejatinya tidak lah bertentangan dengan hukum Islam. namun bila hal itu dikaitkan dengan asas Ijbari hukum kewarisan maka akan terlihat pertentangannya, dikarenakan dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di masyarakat maka secara tidak di sadari mengesampingkan atau bahkan melupakan ketentuan hukum Islam sehingga ini sangat disayangkan akan eksistensi kewarisan dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, mengkaji pertautan antara Islam dan adat dalam bidang kewarisan merupakan sesuatu yang diperlukan karena sulit dihindari dalam kehidupan umat Islam termasuk pada masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif dengan pendekatan empiris, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini: (1) Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu kebiasaan menyelesaikan mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah keluarga untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung atau *due procces dispute resolution kewarisan* (bahasa temuan fakta ilmiah) dengan kompromi penyelesaian sengketa waris. Sikap mental masyarakat tetap membagi harta secara Islam, kemudian harta digabung dengan nilai kemanusiaan (*humanis*). (2) Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara mutlak memberlakukan teori otoritas hukum Islam dengan berlakunya hukum *faraid* kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi. Adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta (*hifzul maal*) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode *islah* yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip *ta'abbudi* dalam konteks menjalankan hukum *faraid* yang juga bertujuan syariat (*maqashid syariah*) memelihara agama (*hifzul din*) kemudian menjalankan prinsip *ta'aqqulli* berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) di masyarakat.

Kata kunci: *tradisi, penyelesaian sengketa, kewarisan*

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)**
2. Nama peneliti :
 - a. H. SYAIKHU, MHI (Koordinator)
 - b. Dr. IBNU ELMI A.S. PELU (Anggota)
 - c. JEFRY TARANTANG (Anggota/Sekretaris)
3. Fakultas : Fakultas Syariah
4. Perguruan Tinggi : IAIN Palangka Raya
5. Bidang ilmu : Hukum Islam
6. Materi : Waris Hukum Islam
7. Sub materi : Fiqih Mawaris
8. Subjek :
 - a. Masyarakat Kalimantan Tengah;
 - b. Para pihak yang terlibat dalam sengketa waris; dan
 - c. Hakim Pengadilan Agama dan KUA.
9. Lokasi : Kalimantan Tengah
10. Waktu : Tahap I selama 2 bulan (Mei s.d. Juni 2018)
Tahap II selama 3 bulan (Juli s.d. Agustus 2018)
11. Biaya : Rp 25.000.000,-

Palangka Raya, Februari 2018

Mengetahui/mengesahkan:
Dekan Fakultas Syariah

Koordinator Tim Peneliti,


H. SYAIKHU, MHI
NIP 19711107199031005


H. SYAIKHU, MHI
NIP 19711107199031005

ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENELITIAN KELOMPOK DOSEN
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2018
JUDUL: "TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
(Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)"

No	Uraian	Volume		Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Belanja Honor				4.300.000	4.300.000
	a Honor Pengolah Data	1	OK	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	b Honor Sekretariat	5	Bulan	300.000	1.500.000	1.500.000
	b Honor Penanggap Utama	2	OK	500.000	1.000.000	1.000.000
	c Honor Moderator	2	OK	150.000	300.000	300.000
2	ATK dan Dokumentasi				11.898.000	11.898.000
	a Kertas kuarto	5	rim	35.000	175.000	175.000
	b Flashdisk 8 GB	5	buah	106.000	530.000	530.000
	c katrij	6	buah	250.000	1.500.000	1.500.000
	d Fotokopi bahan referensi	7000	lbr	200	1.400.000	1.400.000
	e Pulpen	1	kotak	75.000	75.000	75.000
	f Materai	6	lbr	7.000	42.000	42.000
	g Penggandaan bahan seminar	60	eks	70.000	4.200.000	4.200.000
	h Laporan/penjilidan	6	eks	151.000	906.000	906.000
	i Dokumentasi	5	Paket	500.000	2.500.000	2.500.000
	j Buku Kerja	6	Buah	50.000	300.000	300.000
	k Tinta Printer	9	buah	30.000	270.000	270.000
3	Konsumsi				4.802.000	4.802.000
	a Konsumsi Seminar	70	Kotak	35.000	2.450.000	2.450.000
	b Snack Rapat Kelompok (8x6)	48	Kotak	14.000	672.000	672.000
	c Konsumsi rapat kelompok (8x6)	48	Kotak	35.000	1.680.000	1.680.000
4	Belanja Perjalanan				4.000.000	4.000.000

a	Sewa Mobil	4	OH	750.000	4.000.000	4.000.000
Jumlah 1+2+3+4					25.000.000	25.000.000

Palangka Raya, Februari 2018

Mengetahui/mengesahkan:
Dekan Fakultas Syariah



H. SYAIKHU, MHI
NIP 19711107199031005

Koordinator Tim Peneliti,



H. SYAIKHU, MHI
NIP 19711107199031005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SYAIKHU, MHI
Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 7-11-1971
Golongan/Jabatan : Pembina Tingkat I/IVb
Jabatan dalam Penelitian : Koordinator Tim Peneliti
Tim Peneliti : 1. H. SYAIKHU, MHI
2. Dr. IBNU ELM I A.S. PELU, SH, MH
3. JEFRI TARANTANG, S.Sy., SH, MH
Kategori Penelitian : Pengembangan Dasar Pengembangan Prodi
Anggaran Dana : Rp 25.000.000,-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dengan judul **TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya):**

1. Bukan merupakan proposal tesis, disertasi, atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya;
2. Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga sebelumnya;
3. Menyatakan siap menyelesaikan penelitian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat. Apabila dikemudian hari ternyata data yang diberikan tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palangka Raya, Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

Koordinator Tim Peneliti,



H. SYAIKHU, MHI
NIP 19711107199031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ANGGARAN BIAYA	v
SURAT PERNYATAAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Deskripsi Teoritik.....	12
1. Kewarisan dan Hukum Waris	12
2. Hukum Adat	14
3. Teori Hukum Waris.....	17
a. Ijbari	17
b. Alkulturasi	19
C. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	24

	B. Sistematika Penulisan.....	24
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
	A. Profil Lokasi Penelitian.....	25
	1. Kabupaten Katingan.....	25
	a. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Katingan	25
	b. Visi dan Misi Kabupaten Katingan	27
	c. Letak Geografis Kabupaten Katingan	28
	d. Penduduk	30
	e. Agama.....	31
	2. Kota Palangka Raya	32
	a. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya	32
	b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya.....	36
	c. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	36
	d. Penduduk	38
	e. Agama.....	38
	B. Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.....	39
	1. Tradisi di Kabupaten Katingan	40
	2. Tradisi di Kota Palangka Raya.....	48
	C. Keberlakuan Hukum Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Tradisi Masyarakat Kalimantan Tengah Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.....	67
BAB V	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran.....	100

DAFTAR RUJUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km². Berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Kalteng mempunyai 13 kabupaten dan 1 kota.¹ Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,62%), Jawa (21,67%) dan Banjar (21,03%). Sementara itu, agama yang dianut di Provinsi ini mayoritas Islam (74,31%), Kristen Katolik-Protestan (18,60 %), Kaharingan (6,26 %), Hindu (0,50 %), serta Budha (0,10 %).²

Jumlah penduduk pada tahun 2002 berjumlah 1.874.900 jiwa dengan perbandingan 49% perempuan dan 51% laki-laki. Perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Propinsi Kalimantan Tengah tergolong kurang padat yaitu 12 jiwa/Km². Bila diamati menurut Kabupaten dan Kota terdapat perbedaan kepadatan penduduk yang cukup berarti, dimana Kota Palangka Raya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Tengah merupakan kota dengan kepadatan paling tinggi 71,50 jiwa/KM², sedangkan Kabupaten Barito Utara merupakan Kabupaten dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu 6,30 jiwa/KM².³

Secara normatif pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam Alquran dan Hadis, hal ini sebagaimana asas Ijbari dalam kewarisan. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah

²<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=6200000000>

³https://kalteng.go.id/INDO/informasi_umum_kalimantan_tengah.htm

menunjukkan petunjuk (*dalalah*) *qath'iy*.⁴ Namun dalam kenyataan sebagaimana tradisi masyarakat Kalimantan Tengah yang sering melakukannya secara berulang-ulang menggunakan cara perdamaian (*musyawarah*) seperti yang terjadi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai pasal 183 yang menyatakan “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”

Meminjam bahasa *ushul fiqh*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemashlahatan, disebutkan dengan ‘*urf*. ‘*Urf* adalah kata dalam bahasa Arab yang terjemahannya cenderung diartikan dengan adat, atau kebiasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ‘*urf* adalah kata lain dari adat. Amir Syarifuddin juga tidak membadakan antara *al-‘ādat* dan ‘*urf*. Menurutnya, hakikat *al-‘ādat* dan ‘*urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat manusia.⁵ Jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara damai atau *musyawarah* tidak secara otomatis menduakan ketentuan hukum Islam. karena cara penyelesaian dengan cara damai (*al-shulh*) merupakan term qurani (Qs. An-Nisa [4]: 128, Al-Anfal [8]: 1, Al-Hujurat [49]: 9-10).⁶

Persoalan pembagian kewarisan tidak jarang menimbulkan konflik yang harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul tersebut, masyarakat biasanya telah menentukan suatu aturan tersendiri untuk menyelesaikan pembagian kewarisan. Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya juga memiliki suatu

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, 198.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 71. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan *al-‘ādat* atau ‘*urf* sebagai sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 464.

⁶Ahmad Rofiq, *Op.cit.* h. 199.

tradisi tersendiri dalam menyelesaikan pembagian kewarisan. Kehadiran Islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia. Agama dan budaya⁷ adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah kensepsi mengenai konstruksi realitas. Menurut Zulfa Jamalie,⁸ Agama berperan besar dalam menjelaskan stuktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom, local genius*).

Pergulatan interaksi antara hukum Islam dan adat ini sejak zaman kolonial memunculkan teori persinggungan yang pernah berlaku di Indonesia seperti teori *receptie in complexu*, teori *receptie*, teori *receptio exit*, dan teori *receptio a contrario*. Menurut kajian teori tersebut ditegaskan bahwa bagi umat Islam dalam bidang kewarisan sangat sulit dihindari adanya kaitan antara hukum Islam dan adat. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam tidak melarang umat Islam mengakomodasi adat asalkan tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis.

Menurut penulis, bila diperhatikan tradisi penyelesaian sengketa Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yang mengedepankan musyawarah sejatinya tidak lah bertentangan dengan hukum Islam. namun bila hal itu dikaitkan dengan asas Ijbari hukum kewarisan maka akan terlihat pertentangannya, dikarenakan dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di masyarakat maka secara tidak di sadari

⁷Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah tradisi, adat, dan budaya secara bergantian, dalam menunjukkan arti yang sama, yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1208.

⁸Zulfa Jamalie, "Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar, t.th, h. 238.

mengesampingkan atau bahkan melupakan ketentuan hukum Islam sehingga ini sangat disayangkan akan eksistensi kewarisan dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Oleh sebab itu, mengkaji pertautan antara Islam dan adat dalam bidang kewarisan merupakan sesuatu yang diperlukan karena sulit dihindari dalam kehidupan umat Islam termasuk pada masyarakat Kalimantan Tengah dalam penelitian yang berjudul **“TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan melalui tradisi masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk memahami tentang:

1. Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
2. Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun praktis.

⁹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 81.

1. Adapun kegunaan secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah kepustakaan tentang Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya;
2. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan penulis pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya tentang Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat antara lain yaitu:

1. Rosmelina, "Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)". Masyarakat adat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki sebagaipenerus keturunan si bapak yang ditarik dari satu bapak kandung. Sehingga apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki dan dinikahkan dengan anak perempuannya. Dalam hal ini anak perempuan mengadakan upacara pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat tersebut. Dalam hal ini kedudukan suami dan istri adalah sejajar, namun dalam penguasaan harta sepenuhnya akan dikuasai anak laki-lakinya kelak. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Lampung Pesisir dilakukan dengan cara mufakat. Hal ini menjadi acuan apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta waris maka akan diselesaikan dengan mencari jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan atau mufakat. Jika terjadi kesulitan maka keluarga akan menyerahkan ke peradilan adat yang dipimpin oleh punyimbang adat untuk menyelesaikan masalah yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang di hormati

oleh seluruh warga karena peranan punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.¹⁰

2. Ika Islamiati Ningsih, penelitiannya berjudul “Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember”.¹¹ Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan dari pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris antara lain: Karena adanya rasa belas kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian. Sedangkan cara untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris, pembagian harta peninggalan sama rata, musyawarah dan menyerahkan persoalan kepada pihak desa. Penelitian Ika Islamiati Ningsih, terfokus pada pembagian harta waris yang didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi ahli warisnya. Dalam penelitiannya ialah mendeskripsikan suatu masalah mengapa pembagian waris berdasarkan ekonomi ahli waris itu dilakukan dan bagaimana cara menghindari konflik atau pertikainnya. Dalam latar belakangnya Ika juga menerangkan bahwa pertimbangan ekonomi ahli waris misalnya dapat berbentuk ahli waris adalah seorang PNS maka bagiannya sedikit sedangkan ahli waris yang non PNS maka bagiannya juga banyak.
3. Muhammad Imaduddin dengan judul “Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kyai Pesantren (Studi Di Keluarga Pesantren Kabupaten Jember)”. Hasil penelitiannya ialah Kyai di Kabupaten Jember dalam membagi harta warisan yaitu dibagi semasa hidup dengan cara hibah dan meninggalkan harta yang sekiranya kurang berharga. Tujuan dibaginya harta warisan semasa hidup yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan, pertengkaran, permusuhan dan ketakutan akan

¹⁰<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>.

¹¹Ika Islamiatiningsih, *Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember*, Skripsi Malang: UIN-Malang, 2010.

fakir sepeninggal para kyai dan para kyai juga ingin menjadikan ilmu sebagai warisan utama untuk memperjuangkan pesantren-pesantrennya. Pembahasannya fokus untuk mendeskripsikan bagaimana cara para Kyai Pesantren Jember dalam membagi harta waris kepada ahli warisnya. Sesuai hasil penelitiannya bahwa para Kyai membagi harta waris semasa hidup dengan cara hibah. Salah satu tujuannya untuk menghindari pertentangan atau konflik setelah sepeninggal Kyai. Selain itu, ilmu juga merupakan harta waris yang paling berharga untuk menjaga kelangsungan pesantren.¹²

4. Ernawati, dan Erwan Baharudin. Penelitian Penyelesaian Sengketa Pusaka Kewarisan Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman. Adapun kesimpulannya adalah Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang Pariaman termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pusaka kewarisan minangkabau. Sebagian besar responden menyatakan apabila terjadi perselisihan pusaka kewarisan, maka tempat untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan minangkabau berada di Pemangku Adat, walaupun masih ada yang menyatakan ke Pengadilan Agama. Alasan penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariamandalam memilih Pemangku Adat karena keputusan di Pemangku Adat bisa diterima semua pihak yang bersengketa. Sedangkan alasan yang memilih tempat menyelesaikan sengketa pusaka warisan minangkabau di Pengadilan Agama karena mempunyai ketetapan hukum.¹³
5. Jamaluddin yang berjudul "Praktik Pembagian Warisan Keluarga Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar)." Hasil penelitiannya yaitu keluarga muslim di Desa Sesetan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal yaitu anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya

¹²<http://etheses.uin-malang.ac.id>.

¹³Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI-U3) 2017, ISBN 9-789-7936-499-93, h. 374.

ahli waris yang memperoleh harta warisan, namun tidak semua warga Desa Sasetan menggunakan sistem ini, terdapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan hukum Islam. Hal ini didukung karena banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu di pesantren, sehingga sedikit banyak mempengaruhi sistem pembagian waris adat yang ada, sehingga beberapa keluarga muslim di Desa Sasetan membagi warisan menggunakan kewarisan Islam. Penelitian Jamaluddin ialah terfokus pada sistem kewarisan adat patrilineal di Desa Sasetan Kota Denpasar. Dimana anak laki-laki pertama menjadi ahli waris secara penuh dari harta waris orang tuanya. Namun, sistem kewarisan tersebut tidak semua keluarga menggunakannya, karena ada beberapa keluarga yang menggunakan sistem waris berdasarkan hukum waris Islam.¹⁴

6. Penelitian oleh Bahrudin. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implikasi legalitas akta hibah terhadap pembagian harta waris, dan mengetahui ketentuan hukum hak wasiat wajibah anak angkat terhadap harta waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan bantuan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah, Pasal 1870 KUHPerdata tentang akta otentik sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

...pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila di dalam harta tersebut tidak terdapat hak ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama,

¹⁴<http://etheses.uin-malang.ac.id>.

yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor sosial, yaitu kewajiban timbal balik anak angkat terhadap orang tuanya yang selama ini membesarkan dan mendidik anak angkat mulai dari kecil sampai besar hingga terjalin sebuah kasih sayang yang sangat mendalam antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila beberapa faktor diatas telah terpenuhi maka hak wasiat wajibah ini tidak dapat dihalangi oleh akta hibah. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama, yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah.¹⁵

7. Beni Khaerani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang menekankan pada metode komparasi sebagai pegangan utama. Hasil dari penelitian ini adalah:

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal-pasal 968 KUH Perdata ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria (KHES) pasal 713 yang berbunyi: "Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui". Dan dalam perspektif hukum islam juga tidak memperbolehkan atau tidak sah hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada. Dalam ketentuan pasal mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 992 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta Beni Khaerani, Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH

¹⁵Bahrudin, *Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Waris*, Malang: UIN Malang, 2011.

Perdata), Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2011). Notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu". Maka pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 717 sampai 721.¹⁶

8. Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, Jurnal Wawasan Hukum Universitas Brawijaya Malang Vol. 32, No. 1 Februari 2015. Penelitian berjudul Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). Mengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisan sesuai dengan kehendaknya dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris. Hasil analisis menunjukkan (1) munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Proses pembagian warisan hak atas tanah dilandasi surat wasiat dapat dilakukan melalui cara *testament*, (2) proses pembagian warisan hak atas tanah yang dilandasi surat wasiat, sesuai aturan berlaku adalah menurut Kompilasi Hukum Islam, (3) Penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris penerima wasiat sebagai akibat tidak dilaksanakannya surat wasiat adalah menggunakan cara penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan. Kesimpulan, sebagai salah satu pewaris yang memberikan wasiat sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, dan

¹⁶Beni Khaerani, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata)*, Malang: UIN Malang, 2011.

pembagian warisan tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya.¹⁷

B. Deskripsi Teoritik

Deskripsi Teoritik merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis untuk membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi.¹⁸ Untuk konteks kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya tidak dapat dipungkiri bahwa kaitan prinsip kewarisan Islam dan adat saling tarik menarik satu dengan yang lain. Hal ini karena dalam sistem kewarisan Islam selain terdapat bagian-bagian yang tidak dapat diubah, tetapi juga banyak hal yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sehingga untuk memahami dan mempelajari kenyataan pola kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah.

1. Kewarisan dan Hukum Waris

Kata kewarisan, berasal dari kata waris yang bersumber dari bahasa Arab, yaitu *warasa-yaritsu-waritsan*, yang berarti perpindahan harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Dalam *term* Al-Quran dan Hadits ditemukan banyak padanan kata tersebut, semisal *faridhah*, *tirkah*, dan lain-lain. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, sebagaimana yang dikutip Beni Ahmad Saebani, makna *faridhah* adalah

Faraidh adalah bentuk jamak dari *faridhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-faraidh*, menurut istilah bahasa adalah kepastian,

¹⁷Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, Jurnal Wawasan Hukum Universitas Brawijaya Malang Vol. 32, No. 1 Februari 2015, h. 22.

¹⁸Asni Zubair, dkk., "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)", *Jurnal Al-Risalah*, Januari -Juni 2016, h. 3.

sedangkan menurut istilah syara', artinya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹⁹

Hak kewarisan seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu, yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan oleh nash-nash Al-Quran dan Hadits.²⁰ Sebab-sebab kewarisan adalah pertama adanya hubungan kekerabatan, kedua adanya hubungan pernikahan, ketiga adanya hubungan wala' yaitu hubungan bekas budak dengan orang yang memerdekakan, dan yang terakhir adalah tujuan Islam, yaitu baitul mal, yang merupakan penampungan harta warisan bagi orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.

Dalam kewarisan, yang menjadi rukun-rukun waris adalah *mauruts* (harta yang diwariskan), *muwarits* (orang yang meninggal dunia), *waris* (orang yang berhak mendapat warisan).²¹ Sedangkan syarat-syaratnya adalah pewaris harus bisa dipastikan bahwa ia telah benar-benar mati, baik mati hakiki, maupun mati hukmi, selain itu, harus hidupnya ahli waris di saat kematian pewaris, dan terakhir adalah dipastikan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata "waris" atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut "Pusaka". Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya *Miras*. Masdar yang lain menurut ilmu sharaf masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum arab akan

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, h. 14. Lihat juga Syekh Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim, *Fathul Mu'in*, Pdf., T.Td., h. 41.

²⁰Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...*, h. 17.

²¹M Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh Madrasah Aliyah: Kelas Tiga*, Semarang: PT Karya Toha Putra, T.th., h. 20-22. Lihat juga Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Wahyudi Abdurrahman, Jakarta: Al-Kautsar, 2009, h.11-41.

ditemukan penggunaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasulullah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah bersabda: Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang (HR Ahmad). Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 "Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian". Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan: "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup." Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.²²

2. Hukum Adat

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengertian "Adat", aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; *menurut-daerah ini laki-lakilah yang berhak sebagai ahli waris*; kebiasaan; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; *demikianlah-nya apabila ia marah*; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkait menjadi satu sistem; *-bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, pb pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengikat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan lainnya)*; *-diisi, lembaga dituang, pb melakukan sesuatu menurut adat kebiasaan*; *-sepanjang jalan, cupak sepanjang betung, segala sesuatu ada tata caranya*.²³

²²Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Gender Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, t.th, h.10-11

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 5-6.

Bushar Muhammad²⁴ mengutip beberapa buku yang menjelaskan tentang ruang lingkup Hukum adat menurut Kusmadi²⁵ adalah istilah bahasa Belanda *adatrecht*. Sedangkan orang yang pertama memakai istilah *adatrecht* tersebut adalah Snouck Hurgronje²⁶ dan selanjutnya istilah ini digunakan oleh van Vollenhoven sebagai istilah teknis juridis. Selanjutnya Bushar menambahkan bahwa sebelumnya hukum adat itu dinyatakan dengan berbagai istilah, seperti dalam perundang-undangan²⁷: *godsdientige wetten, volksinstellingen en gebruiken* (Pasal 11 AB)²⁸, *godsdientige wetten instellingen en gebruiken* Pasal. 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854)²⁹, dari sumber tersebut maka untuk hukum adat digunakan istilah ; undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan sebagainya.

Menurut peraturan perundang-undangan, istilah *adatrecht* itu baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Dikalangan orang banyak menurut Bushar Muhammad orang hanya mendengar istilah “adat” saja yang pada dasarnya berasal dari Bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Di berbagai suku atau golongan dipakai istilah bermacam-macam, seperti daerah Gayo (*odot*), di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (*adat, ngadat*), di daerah minangkabau lembaga (*lembago*) atau adat-lembaga-kadang-kadang dipertentangkan antara *adai* dan lembaga, yaitu “adat” adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan “lembaga” tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum; di daerah

²⁴Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, 2003, Jakarta; Pradnya Pramita, cet. Ke. 12, h. 1.

²⁵Lihat, Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, 1961, hl. 59-60, memberikan pemahaman bahwa “hukum adat” adalah hukum yang berlaku pada masyarakat lokal.

²⁶Lihat, C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, 1893, jilid-1, hl. 16

²⁷Sebagian perundang-undangan yang dibuat pada zaman kolonial ini masih tetap berlaku eks-pasal 11 aturan Peralihan UUD 1945.

²⁸AB adalah singkatan dari *Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, *Indisch Staatsblad* (Ind. Stbl.) 1847

²⁹RR adalah singkatan dari *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands Indie*, *Ind. Stbl* 1855

Minahasa dan Maluku terdengar istilah adat kebiasaan, disitu dipakai istilah-istilah basa atau bicara yang meupakan kebiasaan kesusilaan.

Hukum Adat merupakan sistem hukum non-statutair yang diciptakan oleh Snouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, di mana hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal. Sedangkan hukum syariat adalah seperangkat peraturan atau hukum ilahiyah yang bersumber kepada al-Quran dan al-Sunnah, serta memuat norma-norma hukum universal baik yang bersifat dimensi vertikal mau-pun horizontal. Term umum yang biasa disebut syariat terbentuk dari beragam produk hukum hasil pemikiran para ulama (fiqh), yang kemudian ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui proses kodifikasi (*taqnin*), hingga hukum Islam itu menjadi hukum positif.³⁰

Terkait dengan hukum adat ini, Chairul Anwar³¹ menjelaskan bahwa persekutuan-persekutuan yang berada di dalam suasana hukum adat itu, hanya merupakan persekutuan-persekutuan hukum yang kecil-kecil, seperti nagari, desa dan sebagainya. Masing-masing persekutuan hukum tersebut merupakan kesatuan yang mempunyai anggota-anggota di dalam lingkungannya. Antara anggota tersebut dengan kesatuannya terdapat hubungan yang erat di dalam pertaliannya. Untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan persekutuan hukum tersebut, maka harus menjumpai orang-orang yang berkuasa yang bertindak atas nama persekutuan itu.

Kolaborasi antara kedua hukum itu mengakibatkan adanya pandangan bahwa hukum Adat merupakan hukum kebiasaan yang

³⁰Komari *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015, h. 157.

³¹Chairun Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minang*, Jakarta ; Rineka Cipta, Cet-1, 1997, h. 7.

mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), dan berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, di mana kebiasaan yang merupakan Adat adalah perbuatan-perbuatan yang di-ulang-ulang dalam bentuk yang sama. Namun hukum dalam bentuk ini juga dapat dijumpai di setiap negara termasuk negara maju, dan di negara-negara Islam, dalam hukum Islam disebut "*al-'urf*" atau "*al-'adah*". Hukum Adat di Indonesia yang ditemukan van Vollenhoven yang merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk melaksanakan politik *devire et impera* bangsa Indonesia. Bahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya bagi warga negara yang beragama Islam telah menciptakan tata nilai yang mengatur tata kehidupan paling tidak menetapkan baik-buruk yang menjadi perintah dan larangan agama, dan kepatuhan hukum dan yurisprudensi Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif.³²

3. Teori Hukum Waris

a. Ijbari

Kata *ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. Karena hukum warisan Islam berasaskan *ijbari*, maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata barat. Kemudian Amir Syarifuddin pengertian asas *ijbari* itu me-ngandung beberpa segi. Pertama, segi peralihan harta, artinya dengan meninggal dunianya seseorang dengan sedirinya harta peninggalannya beralih kepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya. Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta peninggalan pewaris; Kedua, segi jumlah harta artinya jumlah atau bagian ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris) itu sudah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pewaris

³²Komari *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015, h. 158.

dan ahli tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagian-bagiannya; dan Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih, artinya orang-orang (ahli waris) yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah SAW, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diperbolehkan merubahnya.³³

Ijbari menurut hukum islam adalah peralihan harta warisan secara otomatis atau berlaku dengan sendirinya kepada ahli warisnya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kehendak ahli waris atau pewaris.³⁴ Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah di tentukan. Ijbari dapat dilihat dari berbagai segi, yakni: *Pertama*, segi peralihan harta. Mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan pada pengalihan tampak ada usaha dari seseorang. Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisaa’: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *nasib* dari harta peninggalan orang tua dan karib

³³Komari *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015, h. 167.

³⁴Abdul Wahid dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 23.

kerabatnya. Kata *nasib* dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian, atau jatuh dari harta peninggalan si pewaris.

Kedua, segi jumlah harta yang beralih. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.³⁵

Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih. Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Asas *Ijbari* ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: 1. dari peralihan harta; 2. dari segi jumlah harta yang beralih; 3 dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas *Ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata *nasib* dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatuh dari harta peninggalan si pewaris.³⁶

b. Akulturasi

Akulturasi dalam kajian antropologi memiliki beberapa makna (*Aculturation* atau *Culture Conttaci*). Ini semua menyangkut proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing tersebut lambat laun diterima dan di

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 19

³⁶ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Gender Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, t.th, h. 12.

olah dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu³⁷.

Proses akulturasi memang sudah ada sejakdulu kala, tetapi prosesnya dengan sifat yang khusus baru ada ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat mulai menyebar kedaerah-daerah lain di muka bumi pada awal abad ke 15 dan mulai dan mulai mempengaruhi masyarakat suku bangsa di Afrika, Asia, Oceania, Amerika Utara dan Amerika Latin. Mereka membangun pusat-pusat kekuatan diberbagai tempat di sana yang menjadi pangkal pemerintah-pemerintah jajahan dan berakhir pada abar ke 19 dan awal abad ke 20 mencapai puncak kejayaan.

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis mengkaji penelitian ini maka disusun kerangka pikir mengenai tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah yang terbagi ke dalam beberapa pikiran, yaitu penulis melakukan eksploarasi tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah, dan kemudian melakukan analisis keberlakuan hukum tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah tersebut dengan menggunakan penelitian empiris. Lebih lanjut penulis gambarkan sebagai berikut:

³⁷Koentjaraningrat (2005), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 155.

Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah
(Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)

Penelitian Empiris-Normatif
Pendekatan:
Empiris
Historis
Statue
Conceptual

Tradisi penyelesaian
sengketa kewarisan
masyarakat Kalimantan
Tengah pada Kabupaten
Katingan dan Kota
Palangka Raya

Keberlakuan hukum
penyelesaian sengketa
kewarisan melalui tradisi
masyarakat Kalimantan
Tengah pada Kabupaten
Katingan dan Kota
Palangka Raya

BAB III

METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan.

Adapun penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan, seperti Undang-undang, hingga Peraturan Pemerintah. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti perundangan dan putusan pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah berfokus pada tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yang dianalisis dengan pendekatan empiris. Adapun keberlakuan hukum tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dianalisis dengan pendekatan sejarah (*historical approach*), dan juga

dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸

3. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Bahan hukum empiris berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat dan aparat serta lembaga atau instansi yang melakukan tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum empiris berupa data lapangan dari hasil wawancara terhadap informan dan responden. Kemudian dipadukan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disesuaikan dengan isu hukum dan pendekatan yang telah ditetapkan. Bahan hukum yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, penulis akan membahas permasalahan analisis tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan

³⁸Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, h. 12.

Kota Palangka Raya secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan menganalisis tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori. Dimana, dengan metode ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I, tentang Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
2. Bab II, tentang Kajian Pustaka yang memuat Penelitian Terdahulu, Deskripsi Teoritik, dan Kerangka Pikir.
3. Bab III, tentang Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
4. Bab IV, tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat Profil Lokasi Penelitian, Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, dan Keberlakuan Hukum Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
5. Bab V, tentang Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya

1. Kabupaten Katingan

a. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Semboyan kabupaten ini adalah "*Penyang Hinje Simpei*" (bahasa Ngaju) yang artinya adalah Hidup Rukun dan Damai untuk Kesejahteraan Bersama. Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan 154 Desa dan 7 Kelurahan.

Kabupaten Katingan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada mulanya luas Kabupaten Katingan adalah 17.500 km². Namun, semenjak pembentukan wilayah tersebut pemerintah daerah Kabupaten Katingan terus melakukan kajian penetapan tata batas administrasi. Hasil Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Katingan hingga saat ini adalah 20.410,27 km².⁴⁰

Pada abad ke-14 wilayah Katingan merupakan salah satu wilayah jajahan Majapahit seperti yang disebutkan dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365. Nama sungai Katingan diambil dari nama daerah yang terdapat di hulu sungai tersebut, yaitu daerah Katingan (Kasongan). Belakangan muncul daerah baru di hilir, yaitu Mendawai.⁴¹

⁴⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, *Kabupaten Katingan dalam Angka 2018*, Katingan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2018, h. 5.

⁴¹<https://id.m.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2018).

Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kabupaten Katingan sudah termasuk ke dalam daerah kekuasaan kerajaan Banjar-Hindu (Negara Dipa) sejak pemerintahan Lambung Mangkurat dengan wilayah kekuasaannya perbatasan paling barat berada di Tanjung Puting. Wilayah ini ketika itu terdiri atas dua sakai (daerah), yaitu Mendawai dan Katingan yang masing-masing memiliki ketua daerah sendiri-sendiri yang disebut Menteri Sakai, kemudian pada abad ke-17 pada masa kekuasaan Sultan Banjar IV, Marhum Panembahan (Raja Maruhum), wilayah Mendawai-Katingan merupakan salah satu daerah yang diberikan kepada puteranya Pangeran Dipati Anta-Kasuma yang kemudian menjadi adipati/raja Kotawaringin menggantikan mertuanya Dipati Ngganding yang wilayah kekuasaannya meliputi bagian barat Kalimantan Tengah saat ini. Menurut Hikayat Banjar, pada masa itu Pelabuhan Mendawai merupakan tempat transit para pedagang Banjarmasin jika hendak pergi berlayar menuju negara Kesultanan Mataram di pulau Jawa.⁴²

Menurut laporan Radermacher, kepala daerah Mendawai/Katingan pada tahun 1780 adalah Kyai Ingabei Suradi Raja. Kiai Ingabehi Suradiraja adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah berhasil membunuh dua orang pengikut Gusti Kasim dari daerah Negara tahun 1780, kemudian ia dilantik sebagai pembantu utama syahbandar di pelabuhan Tatas(Banjarmasin). Pada tanggal 13 Agustus 1787, wilayah Kabupaten Katingan sudah diserahkan Sultan Tahmidullah II kepada VOC Belanda, kemudian daerah ini berkembang menjadi sebuah Distrik. Pada 2 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjarmasin menyerahkan landschap Mendawai (Katingan) kepada Hindia Belanda. Penguasa Mendawai dan Katingan selanjutnya adalah Djoeragan Kassim (1846), Abdolgani (1848), Djoeragan Djenoe (1850), Jaksa kiai Pangoeloe Sitia Maharaja (1851), Kiai Toeainkoe Gembok (1859).

⁴²*Ibid.*

Selanjutnya Demang Anoem Tjakra Dalam atau dikenal sebagai Demang Anggen, dilantik oleh Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 10 Januari 1895 dan mengepalai wilayah Mandawai (Districtshoofd van Mandawai, afdeeling Sampit, residentje Zuider en Oosterafdeeling van Borneo). Menurut *Staatsblad van Nederlandisch Indië* tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam *zuid-ooster-afdeeling* berdasarkan *Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, pada 27 Agustus 1849, No. 8.⁴³

b. Visi dan Misi Kabupaten Katingan

Visi Kabupaten Katingan adalah: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Katingan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”. Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai – nilai luhur yang melekat dalam perilaku kehidupan masyarakat Kabupaten Katingan yaitu “*Penyang Hinje Simpei*” secara filosofis visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Cerdas adalah cita-cita mewujudkan masyarakat katingan memiliki kemampuan berfikir secara cerdas yang memiliki ketajaman intelektual serta memiliki kecerdasan emosional dan spritual.
- 2) Sehat adalah cita-cita mewujudkan masyarakat katingan yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani.
- 3) Terbuka adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat katingan memiliki akses transportasi, telekomunikasi dan informasi serta energi terbuka baik dalam maupun luar daerah untuk menunjang perekonomian daerah.⁴⁴

Melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan Kabupaten Katingan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2013-2018, maka dirumuskan misi induk sebagai berikut: “Pelayanan yang

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ <https://jdih.katingankab.go.id> (diakses tanggal 27 Agustus 2018).

Baik agar Terwujud Katingan Cerdas, Sehat dan Terbuka dalam Keadilan dan Kesejahteraan”.⁴⁵

Rumusan misi induk tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan tahun 2013-2018 sebagai komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama dari arah pembangunan Kabupaten Katingan selama lima tahun kedepan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemahaman pola pikir dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas dalam sistem dan kelembagaan pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan, imtaq, iptek dan berwawasan lingkungan.
- 4) peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam rangka pelayanan prima dan daya dukung ekonomi.⁴⁶

c. Letak Geografis Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini terletak antara 0°20' - 3°38' Lintang Selatan dan 112°00' - 113°45' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Katingan memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Kabupaten Malawi Provinsi Kalimantan Barat; sebelah timur dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang Pisau; sebelah selatan dengan Laut Jawa; dan sebelah barat dengan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan sebagaimana tabel di bawah ini:⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, *Kabupaten Katingan dalam Angka 2018*, Kasongan: Badan Statistik Kabupaten Katingan, 2018, h. 3.

Batas Wilayah Kabupaten Katingan

No.	Batas Kabupaten Katingan	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Malawi
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau
3.	Sebelah Selatan	Laut Jawa
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Kotawaringin Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Tahun 2018.

Ibu Kota Kabupaten Katingan adalah Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Luas Kabupaten Katingan adalah 17.500 km². Namun, semenjak pembentukan wilayah tersebut pemerintah daerah Kabupaten Katingan terus melakukan kajian penetapan tata batas administrasi. Hasil Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Katingan hingga saat ini adalah 20.410,27 km².⁴⁸

Kabupaten Katingan terdiri atas 13 kecamatan, yaitu: Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya, dengan perincian sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸*Ibid.*, h. 5.

⁴⁹*Ibid.*

Luas Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Area (km ²)	% Terhadap Kabupaten
Katingan Kuala	1.484,81	7,27
Mendawai	2.391,58	11,72
Kamipang	2.854,27	13,98
Tasik Payawan	808,12	3,96
Katingan Hilir	665,22	3,26
Tewang Sangalang Garing	903,39	4,43
Pulau Malan	647,48	3,17
Katingan Tengah	1.635,65	8,01
Sanaman Mantikei	2.772,38	13,58
Petak Malai	1.661,65	8,14
Marikit	2.117,36	10,37
Katingan Hulu	1.461,27	7,16
Bukit Raya	1.007,72	4,94
Total Wilayah	20.410,27	100%

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dalam BPS Kota Palangka Raya, Tahun 2018.

d. Penduduk

Penduduk Kota Katingan adalah Suku Dayak Katingan yang merupakan subetnis rumpun Dayak Ngaju yang mendiami sepanjang tepian daerah aliran Sungai Katingan atau sungai Mendawai di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.⁵⁰ Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya jumlah penduduk Kabupaten Katingan adalah 165.306 jiwa.⁵¹

⁵⁰Suku Dayak Katingan merupakan suku baru yang muncul dalam sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2000 dan merupakan 3,34% dari penduduk Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya suku Katingan tergabung ke dalam suku Dayak pada sensus 1930. Lihat <https://id.m.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2018).

⁵¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, *Kabupaten Katingan dalam Angka 2018*, Kasongan: Badan Statistik Kabupaten Katingan, 2018, h. 58.

Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Area (km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²
Katingan Kuala	1.484,81	20.745	14
Mendawai	2.391,58	4.064	2
Kamipang	2.854,27	6.687	2
Tasik Payawan	808,12	8.538	11
Katingan Hilir	665,22	35.979	54
Tewang	903,39	12.511	14
Sangalang Garing			
Pulau Malan	647,48	9.215	14
Katingan Tengah	1.635,65	33.554	21
Sanaman	2.772,38	10.351	4
Mentikei			
Petak Malai	1.661,65	4.054	2
Marikit	2.117,36	7.061	3
Katingan Hulu	1.461,27	8.575	6
Bukit Raya	1.007,72	3.972	4
Total Wilayah	20.410,2	165.306	
	7		

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2020 (BAPPENAS, BPS dan UNFPA), Tahun 2018.

e. Agama

Penduduk Kabupaten Katingan terdiri dari berbagai penganut agama, antara lain yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, dan Hindu. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di Kabupaten Katingan dapat terlihat pada tabel berikut ini.⁵²

⁵²*Ibid.*, h. 128.

**Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan Berdasarkan Agama
Tahun 2017**

Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu
Katingan Kuala	19.725	1	28	3
Mendawai	3.968	123	13	14
Kamipang	6.471	267	16	135
Tasik Payawan	4.764	756	562	2.409
Katingan Hilir	23.991	5.386	612	1.963
Tewang Sangalang Garing	4.723	3.366	139	3.808
Pulau Malan	5.216	1.823	207	2.389
Katingan Tengah	17.087	5.972	766	3.076
Sanaman Mantikei	3.654	3.883	93	4.244
Petak Malai	941	1.993	67	2.887
Marikit	1.693	1.778	604	5.087
Katingan Hulu	3.371	1.959	226	3.353
Bukit Raya	1.065	1.567	331	3.433
Total	96.930	29.705	3.664	32.801

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Katingan, Tahun 2018.

2. Kota Palangka Raya

a. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukan ini berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 dan Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284). Peraturan ini berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra (pemerintahan sendiri/otonomi) Provinsi Kalimantan Tengah.⁵³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang

⁵³Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018, h. xli.

Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.⁵⁴

Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain memepersiapkan Kotapraja⁵⁵ Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J. M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁵⁶

Perubahan, peningkatan dan pembentukan kecamatan dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yaitu dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan:

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Kotapraja adalah daerah dan pemerintahan kota yang setingkat dengan kabupaten. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 598.

⁵⁶Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018, h. xlii. Lihat juga Kukuy, 2009, *Informasi Umum dan Sejarah di Kalimantan Tengah*, <http://archive.kaskus.co.id/thread/1502872>, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2018).

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit

Awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 dan Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁵⁷

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR), Bapak L. Shandoko Widjoyo. Selain itu juga dihadiri oleh para Anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral Tentara Nasional Indonesia (TNI) M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi Kalimantan lainnya.⁵⁸

Upacara peresmian Kotapraja Palangka Raya berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota. Sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1947 pukul 08.00 WIB, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi tersebut dipelopori oleh *Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung* yang berjumlah 14 orang, di bawah pimpinan Ketua Tiri

⁵⁷*Ibid.*, h. xlii-xliii.

⁵⁸*Ibid.*, h. xliii.

Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang terjun di Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Oktober 1947.⁵⁹

Demonstrasi penerjunan payung pada acara peresmian Kotapraja Palangka Raya tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 awak pesawat. Demonstrasi terjun payung ini juga diikuti oleh seorang undangan khusus, yaitu Kapten Udara F. M. Soejoto (mantan paratroop 17 Oktober 1947), dan 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara.⁶⁰

Pada tanggal 17 Juni 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia⁶¹, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yaitu Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya. Kemudian Menteri Dalam Negeri menyerahkan lambang Kotapraja Palangka Raya kepada Bapak Tjilik Riwut. Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Daerah Kotapraja Palangka Raya. Selanjutnya setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.⁶²

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*, h. xlv.

⁶¹Sejauh ini penulis tidak mengetahui Nomor Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Tjilik Riwut selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya yang dimaksud, karena pada sumber rujukan tidak disebutkan secara rinci.

⁶²Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018, h. xlv. Lihat juga Kukuy, 2009,

b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Visi Kota Palangka Raya adalah: “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang”. Sedangkan misi Kota Palangka Raya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan orientasi Nasional dan Global, Sumber Daya Manusia yang Berilmu, Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Pelayanan Jasa terhadap Masyarakat.
- 3) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota Wisata yang Terencana, Tertata, Berwawasan dan Ramah Lingkungan.
- 4) Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju Masyarakat Sejahtera.
- 5) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Kedisiplinan Tinggi, Sikap Profesional, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat.
- 6) Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran Politik, Hukum, tertib dan Demokratis.⁶³

c. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113°30' – 114°07' Bujur Timur dan 1°35' – 2°24' Lintang Selatan. Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yakni: Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya,

Informasi Umum dan Sejarah di Kalimantan Tengah, <http://archive.kaskus.co.id/thread/1502872>, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2018).

⁶³*Ibid.*, h. xlv.

Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:⁶⁴

Batas Wilayah Kota Palangka Raya

No.	Batas Kota Palangka Raya	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Gunung Mas
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Kapuas
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Pulang Pisau
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Katingan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Tahun 2018.

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.853,52 Km² (285.352 Ha). Wilayah tersebut dibagi ke dalam 5 (lima) kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: Kecamatan Pahandut 119,37 Km², Kecamatan Sebangau 641,51 Km², Kecamatan Jekan Raya 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu 603,16 Km², dan Kecamatan Rakumpit 1.101,95 Km², dengan perincian sebagai berikut:

Luas Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2017

Kecamatan	Luas Area (km²)	% Terhadap Kota
Pahandut	119,37	4,18
Sebangau	641,51	22,48
Jekan Raya	387,53	13,58
Bukit Batu	603,16	21,14
Rakumpit	1.101,95	38,62
Palangka Raya	2.853,52	100,00

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dalam BPS Kota Palangka Raya, Tahun 2018.

⁶⁴Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018, h. 9.

d. Penduduk

Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli Suku Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa di wilayah kepulauan Nusantara seperti Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, dan lain-lain. Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah 275.667 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:⁶⁵

Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017

Kecamatan	Luas Area (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
Pahandut	119,37	96.723	810
Sebangau	641,51	17.922	28
Jekan Raya	387,53	143.508	370
Bukit Batu	603,16	14.039	23
Rakumpit	1.101,95	3.475	3
Total	2.853,52	275.667	97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Tahun 2018.

e. Agama

Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama, antara lain yaitu: Islam, Kristen, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta kepercayaan lainnya. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

⁶⁵Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018, h. 50-52.

**Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Berdasarkan Agama
Tahun 2017**

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Islam	180.026	69,74 %
2	Kristen	68.867	26,68 %
3	Kristen Katholik	5.173	2,00 %
4	Hindu	3.609	1,40 %
5	Budha	447	0,17 %
6	Khonghucu	7	0,01 %
JUMLAH		258.129	100 %

Sumber: Database SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya/SIAK Database, *Department for Population and Civil Registration of Palangka Raya Municipality*, Tahun 2018.

B. Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya

Tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁶⁶ Adapun yang dimaksud penyelesaian sengketa adalah dalam proses atau upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yaitu anggota keluarga yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, para pihak atau anggota keluarga yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. sedangkan yang dimaksud dengan warisan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka.⁶⁷ Begitu juga yang dimaksud dengan masyarakat Kalimantan Tengah dalam penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

⁶⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel "tradisi", h. 1208.

⁶⁷*Ibid.*, artikel "warisan", h. 1269.

Tradisi atau kebiasaan, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan istilah Al 'Urf. Sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallab yang dikutip oleh Miftahul Arifin, yaitu:

الْعَادَةُ يُسَمَّى وَفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ مِنْ أَعْلَيْهِ وَسَارُوا النَّاسُ مَا تَعَارَفَهُ هُوَ الْعُرْفُ

'Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf disebut juga adat kebiasaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan tradisi penyelesaian sengketa kewarisan dalam konteks penelitian ini adalah cara penyelesaian sengketa waris yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Lebih lanjut peneliti elaborasi sebagai berikut:

1. Tradisi di Kabupaten Katingan

a. UK (Ahli Waris/Katingan Tengah)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:

Tradisi penyelesaian sengketa harta warisan yang kami lakukan di sini (Katingan) yaitu dengan cara kesepakatan keluarga dulu dengan menghitung secara hukum Islam, sesuai bagian ada yang mendapat $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, ada juga yang bagiannya $\frac{1}{6}$. Setelah itu baru dibagi berdasarkan kesepakatan keluarga sesuai tradisi adat secara turun temurun semua dibagi rata, sebab kalau bagiannya sesuai hukum Islam saja, takut terjadi saling iri satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik pembagian yang kami lakukan dengan cara dibagi secara musyawarah keluarga baiknya, harta ini dibagi atau diberikan. Kalau dibilang turun-temurun, bisa jadi soalnya dikalangan keluarga besar kami dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, secara Islam juga melalui jalan damai saja melalui musyawarah atau secara kesepakatan antar keluarga.⁶⁸

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada UK, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

⁶⁸Wawancara pada tanggal 24 Juni 2018.

Kemudian UK menjawab:

Cara penyelesaian sengketa waris dengan cara tersebut bisa diterima oleh para ahli waris, cara ini merupakan jalan damai dengan hukum Islam dulu kemudian melakukan musyawarah untuk menghindarkan dari sifat iri, dengki antar saudara dan keluarga.⁶⁹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada UK, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian UK menjawab:

Kami melakukan rapat keluarga mengenai siapa saja yang berhak atas harta warisan. Kemudian meminta nasehat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk penghitungan secara Islam dan juga mendatangi kantor urusan agama untuk penghitungan harta waris. Kemudian dibagi secara rata, namun juga melihat kondisi ekonomi keluarga, kalau ada yang kurang mampu maka bagiannya dilebihkan, jadi kesepakatan musyawarah ini menyesuaikan situasinya juga.⁷⁰

b. MA (Ahli Waris/Katingan Tengah)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:

Kami disini biasanya apabila ada sengketa warisan maka bagi kami yang beragama Islam terlebih dahulu melakukan pembagian warisan secara Islam kemudian dibagi secara kekeluargaan atau kami sebut secara adat. Karena disini memang seperti itu, untuk menjaga kebersamaan dan jangan sampai membuat malu keluarga berebut harta warisan. Kami orang sini malu kalau sampai masalah harta dibawa keluar.⁷¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MA, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018.

Kemudian MA menjawab:

Cara itu memang sudah biasa dipakai disini jadi semua orang menerima karena ini sudah adil. Jangan sampai keluarga jadi bermusuhan karena harta, keluarga itu lebih berharga daripada harta warisan. Jadi ini sudah biasa dan diterima oleh masyarakat katingan⁷²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MA, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian MA menjawab:

Pertama rapat oleh keluarga yang dipimpin oleh orang yang dituakan di dalam keluarga dan kemudian meminta nasehat dan pandangan dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Setelah itu dihitung secara hukum Islam dan kemudian dibagi rata kepada masing-masing keluarga secara adil.⁷³

c. RS (Ahli Waris/Pulau Malan)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:

Tradisi disini kalau ada sengketa warisan itu dibagi rata, tapi kalau yang beragama Islam harus dibagi dulu secara Islam kemudian dibagi lagi sesuai musyawarah dan kesepakatan keluarga. Bagi kami harta warisan itu jangan sampai membuat keluarga jadi berantakan, keluarga yang awalnya damai tapi karena warisan bisa berkelahi itu menjadi perbuatan yang memalukan. Kalau harta bisa dicari tapi kalau keluarga itu belum tentu ada gantiinya.⁷⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian RS menjawab:

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018.

Kami menerima hal ini dengan ikhlas, ini sudah menjadi kebiasaan orang disini. Hubungan keluarga itu harus terus dijaga, persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Jadi kami menerimanya, yang tidak menerima itu menjadi kurang baik, dan bisa dihiraukan keluarga lagi.⁷⁵

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian RS menjawab:

Caranya diadakan pertemuan keluarga dulu, musyawarah menentukan caranya dengan menghitung bagian warisan sesuai Islam, kemudian membagi dengan rata, musyawarah dan juga keadaan keluarga yang memang membutuhkan.⁷⁶

d. RH (Ahli Waris/Katingan Hilir)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:

Kebiasaan kami dengan cara bagi rata melihat keadaan keluarga tapi dipakai cara Islam dulu kemudian baru dibagi rata. Kami kumpul keluarga bersama membicarakan dan ini sudah kebiasaan dari kakek-nenek kami sudah seperti ini. Kebiasaan memang sudah dilakukan masyarakat disini.⁷⁷

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RH, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian RH menjawab:

Ahli waris menerima dengan lapang dada dan memahami kebiasaan ini. Inikan sudah jadi tradisi kalau ada sengketa biasanya dengan cara ini. Kebiasaan ini sudah biasa dilakukan dan orang

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018.

disini tidak mau ribut masalah harta warisan, paling jumlah harta tidak seberapa juga, jadi buat apa ribut.⁷⁸

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RH, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian RH menjawab:

Biasanya keluarga rapat dulu kemudian dihitung secara Islam bagi yang beragama Islam. Setelah itu musyawarah dan dibagi rata. Biasanya dipanggil orang tua atau yang sudah pengalaman dengan masalah ini, seperti tokoh masyarakat dan juga kalau secara Islam minta hitungan dulu oleh yang paham tentang warisan Islam baru dibagi secara rata dan juga sesuai keadaan ahli waris, kalau memang keadaannya sudah punya harta banyak bisa tidak mengambil bagiannya tapi untuk keluarga yang memang tidak mampu secara ekonomi.⁷⁹

e. EN (Ahli Waris/Katingan Hilir)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:

Tradisi penyelesaian masalah waris kalau disini dengan musyawarah, jika yang beragama Islam dipakai cara Islam tapi kemudian dibagi tetap rata untuk para keluarga (ahli waris). Tradisi atau kebiasaan ini memang sudah terjadi sejak lama. Ini menjadi cara yang baik dalam menyelesaikan masalah harta warisan, dan tidak ingin keluarga jadi pecah dan berantakan karena warisan.⁸⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada EN, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian EN menjawab:

Cara ini memang sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh masyarakat disini. Ahli waris juga menerima kebiasaan ini. Ini

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018.

menjadi cara terbaik dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Bahkan cara ini supaya keluarga tidak bermusuhan dan merasa saling membantu.⁸¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada EN, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian EN menjawab:

Biasanya dilakukan kumpul keluarga dulu kemudian dibahas cara penyelesaiannya, meminta nasehat dari para tokoh masyarakat (agama), bagi yang Islam silahkan dibagi secara Islam tapi setelah itu dilakukan musyawarah untuk pembagiannya secara adil dan rata bagian masing-masing sesuai situasi dan kondisi masing-masing.⁸²

f. RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:

Tradisi yang digunakan masyarakat katingan dalam penyelesaian sengketa waris biasanya dengan musyawarah, tetapi juga menggunakan hukum Islam dulu, baru dibagi sesuai hasil musyawarah ada yang membagi rata, ada juga yang membagi sesuai dengan keadaan dan kondisi ekonomi para pihak.⁸³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RY, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian RY menjawab:

Sejauh ini cara tersebut bisa diterima masyarakat katingan, namun bagi yang tidak terima bisa membawa sengketanya ke Pengadilan, namun sejauh ini belum ada yang sampai ke pengadilan. Sesuai

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

⁸³Wawancara pada tanggal 22 Juni 2018.

tradisi disini biasanya sengketa diselesaikan dengan damai dengan musyawarah keluarga.⁸⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RY, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian RY menjawab:

Caranya dengan melakukan musyawarah keluarga terlebih dahulu, kemudian mereka berkonsultasi dengan tokoh masyarakat dan yang beragama berkonsultasi juga ke kantor urusan agama, sebab disini tidak ada pengadilan agama. Setelah selesai mengenai aturan hukum Islamnya sesuai bagian masing-masing, kemudian musyawarah untuk membagi harta dengan adil dan rata secara kekeluargaan.⁸⁵

g. WH (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Tengah)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:

Masyarakat disini menggunakan musyawarah dalam hal penyelesaian sengketa waris, tapi langkahnya dengan terlebih dahulu melaksanakan hukum Islam dengan hitungan ilmu warisnya. Setelah itu baru menggunakan musyawarah keluarga dengan membagi harta secara adil. Adil disini sesuai dengan keadaan keuangan dari para ahli waris, jika ada yang mampu dan memiliki harta berlebih maka bagiannya tidak banyak, namun bagi yang tidak mampu maka bagiannya lebih banyak. Jadi menyesuaikan aja.⁸⁶

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada WH, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian WH menjawab:

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Wawancara pada tanggal 25 Juni 2018.

Cara ini memang sudah dilakukan masyarakat sejak lama, bahkan cara ini lebih diterima masyarakat. Cara ini dirasa lebih adil dan menghindari perselisihan dalam keluarga. Masyarakat lebih mengutamakan cara ini dibandingkan harus melalui pengadilan.⁸⁷

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada WH, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian WH menjawab:

Biasanya keluarga melakukan musyawarah kemudian juga meminta pandangan tokoh masyarakat dan juga meminta petunjuk dari kantor urusan agama seputar hukum warisnya dalam Islam. Mereka melakukan musyawarah keluarga kemudian melakukan penghitungan waris secara Islam, setelah itu musyawarah membagikan harta waris dengan dibagi rata atau juga dengan melihat kondisi para ahli waris, ada yang sudah mapan, ada yang belum maka bagiannya bisa berbeda sesuai keadaan masing-masing.⁸⁸

h. JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:

Tradisi masyarakat katingan lebih menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, namun mereka juga menggunakan hukum Islam terlebih dahulu menentukan bagian harta waris, kemudian musyawarah menentukan bagian dari masing-masing ahli waris secara kekeluargaan. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan tradisi ini menjadi cara damai masyarakat katingan dalam menyelesaikan sengketa waris.⁸⁹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada JP, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian JP menjawab:

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Wawancara pada tanggal 28 Juni 2018.

Penyelesaian dengan cara ini diterima oleh semua masyarakat, bahkan saya tidak pernah mendengar sengketa yang sampai ke pengadilan. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan para orang tua dulu juga melakukan cara seperti dalam berbagai masalah selain sengketa waris.⁹⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada JP, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian JP menjawab:

Cara yang dilakukan yaitu dengan musyawarah keluarga mengumpulakan seluruh anggota keluarga dan memanggil tokoh masyarakat dengan meminta nasehat dan juga pandangan. Selain itu mereka juga mendatangi kantor urusan agama untuk penghitungan faraidhnya. Setelah selesai hitung waris secara Islam, barulah mereka membagikannya secara kekeluargaan dengan membaginya secara rata, ada juga yang mendapat lebih bagi yang belum menikah sebab dianggap belum mapan.⁹¹

2. Tradisi di Kota Palangka Raya

a. TM (Ahli Waris/Jekan Raya)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:

Kalau ada sengketa kewarisan biasanya cara yang kami lakukan biasanya urun rembuk dengan keluarga kami terlebih dahulu sesuai dengan yang biasanya kami lakukan, kalau sepakat semua ya kita bagi saja sesuai kesepakatan saja. Kesepakatannya bisa menggunakan cara pembagian secara Islam, kami tanya kepada yang ahli dalam hal warisan. Tetapi bisa juga secara musyawarah menyesuaikan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Jadi hitungan warisnya secara Islam dulu kemudian dibagi sesuai kesepakatan musyawarah.⁹²

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²Wawancara pada tanggal 2 Mei 2018.

hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian TM menjawab:

Terlebih dahulu yang kami lakukan biasanya menggunakan hukum Islam dengan cara menghubungi orang yang paham tentang Islam, lalu kami rapatkan musyawarahkan lagi, agar sama-sama tidak merugikan diantara keluarga sesuai dengan tradisi kami.⁹³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian TM menjawab:

Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mencari orang yang paham Islam dulu, tokoh agama atau tokoh masyarakat lah untuk menghitung waris dan ahli warisnya. Tetapi setelah tu kami musyawarahkan dulu dengan keluarga ahli waris yang lain, kalau-kalau memang ada yang membutuhkan dana terlebih dahulu, saling tolong-menolong lah sesama keluarga.⁹⁴

b. PH (Ahli Waris/Bukit Batu)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:

Tradisi yang biasa kami lakukan apabila ada sengketa kewarisan terutama di daerah kami ini biasanya kami kumpul dulu semua ahli waris. Karena kita orang muslim ya menggunakan hukum Islam dulu pembagiannya, ada sudah pembagian-pembagiannya tetapi menyesuaikan lagi keputusan akhir di antara keluarga kami apabila masih ada yang keberatan.⁹⁵

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada PH, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi rata sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵Wawancara pada tanggal 6 Mei 2018.

Kemudian PH menjawab:

Iya diterima, memang di keluarga kami lewat cara hukum Islam dulu karena ya kami orang muslim, tetapi tetap mengikuti tradisi juga makanya seperti yang saya bilang tadi menyesuaikan keputusan akhir lagi di keluarga kami.⁹⁶

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada PH, bagaimana mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian PH menjawab:

Mekanisme atau jalan yang kami lakukan, kami kumpulkan dulu semua keluarga ahli waris kemudian mengikuti aturan Islam dulu sesuai dengan pembagian yang sudah ada, kemudian dibagi lagi berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan keperluan ahli waris. Kalau misalkan ada yang keberatan kita selesaikan secara adat yang ada disini, namun kalau ada masih keberatan silahkan melalui pengadilan saja.⁹⁷

c. AC (Ahli Waris/Sebangau)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:

Bagi kami kebiasaan atau istilahnya tradisi penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan cara hukum Islam dulu, kemudian musyawarah atas kesepakatan keluarga karena beda-beda keadaan keluarga ada yang mampu dan ada juga yang memang tidak mampu. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah dan cara mengatasi konflik keluarga.⁹⁸

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada AC, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian AC menjawab:

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Wawancara pada tanggal 7 Mei 2018.

Tradisi ini memang sudah terjadi lama jadi para ahli waris bisa menerima karena sesuai dengan kebiasaan disini bagi dulu secara Islam bagi yang Islam, kemudian dibagi lagi sesuai kesepakatan agar adil dan tidak ada yang merasa dicurangi.⁹⁹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada AC, bagaimana mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian AC menjawab:

Cara yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kumpul keluarga dan musyawarah kemudian diselesaikan secara Islam bagi yang Islam, lalu dilakukan lagi mausyawarah dengan sebelumnya meminta nasehat dari yang berpengalaman dan punya kemampuan di bidang waris, kemudian dibagi berdasarkan musyawarah keluarga.¹⁰⁰

d. RJ (Ahli Waris/Rakumpit)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:

Bagi kami kebiasaan atau istilahnya tradisi penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan cara hukum Islam dulu, kemudian musyawarah atas kesepakatan keluarga karena beda-beda keadaan keluarga ada yang mampu dan ada juga yang memang tidak mampu. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah dan cara mengatasi konflik keluarga.¹⁰¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada AC, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian AC menjawab:

Tradisi ini memang sudah terjadi lama jadi para ahli waris bisa menerima karena sesuai dengan kebiasaan disini bagi dulu secara Islam bagi yang Islam, kemudian dibagi lagi sesuai kesepakatan agar adil dan tidak ada yang merasa dicurangi.¹⁰²

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Wawancara pada tanggal 7 Mei 2018.

¹⁰²*Ibid.*

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada AC, bagaimana mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian AC menjawab:

Cara yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kumpul keluarga dan musyawarah kemudian diselesaikan secara Islam bagi yang Islam, lalu dilakukan lagi mausyawarah dengan sebelumnya meminta nasehat dari yang berpengalaman dan punya kemampuan di bidang waris, kemudian dibagi berdasarkan musyawarah keluarga.¹⁰³

e. NA (Ahli Waris/Pahandut)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:

Tradisi disini menyelesaikan sengketa waris dengan cara musyawarah keluarga. Tapi dilakukan dulu dengan cara Islam bagi yang Islam. Ini sudah jadi tradisi dan dilakukan untuk menghindari terjadinya rasa permusuhan dan perkelahian dalam keluarga. Masalah harta waris dilakukan secara damai dan jangan sampai menjadi biang permusuhan.¹⁰⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NA, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian NA menjawab:

Ini memang diterima oleh para ahli waris, bahkan sudah biasa dilakukan karena menjadi cara penyelesaian sengketa waris untuk menghindari rasa permusuhan. Jika sudah disepakati melalui musyawarah maka akan diterima oleh para ahli waris.¹⁰⁵

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NA, bagaimana mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian NA menjawab:

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Cara atau proses penyelesaiannya dengan mengumpulkan seluruh keluarga untuk melakukan musyawarah dan bersepakat untuk menyelesaikan sengketa waris dengan membagikannya dulu secara hukum Islam kemudian dibagi lagi secara adil dan merata atau melihat keadaan dan kebutuhan dari ahli waris.¹⁰⁶

f. MHA (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:

Menurut saya tradisi disini dalam menyelesaikan sengketa waris dengan jalan perdamaian yaitu musyawarah oleh keluarga namun juga menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dibagi secara adil kepada masing-masing anggota keluarga (ahli waris). Tradisi ini memang dilakukan oleh masyarakat bahkan sangat sedikit kasus waris yang masuk ke pengadilan.¹⁰⁷

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MHA, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian MHA menjawab:

Tradisi ini diterima masyarakat dengan penuh kesadaran dan juga menjadi suatu jalan damai yang unik. Kami juga dari pihak pengadilan merasa terbantu dengan tradisi ini mengurangi perkara mengenai sengketa kewarisan.¹⁰⁸

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MHA, bagaimana mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian MHA menjawab:

Mereka menyelesaikannya secara musyawarah dulu kemudian melakukan penghitungan hukum waris dengan berkonsultasi ke pos bantuan hukum yang ada di pengadilan agama, namun ada juga yang berkonsultasi dengan akademisi, tokoh masyarakat, kantor urusan agama. Setelah itu mereka membaginya berdasarkan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Wawancara pada tanggal 14 Mei 2018.

¹⁰⁸ *Ibid.*

kesepakatan hasil musyawarah keluarga untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam keluarga.¹⁰⁹

g. SF (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:

Tradisi masyarakat kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa waris yaitu lebih menggunakan musyawarah (non litigasi) dibanding jalur litigasi di pengadilan. Musyawarah dilakukan dengan memperhatikan kondisi keluarga dan kebiasaan yang terjadi. Kebiasaan disini menggunakan hukum Islam dulu dalam penghitungannya kemudian musyawarah untuk kesepakatan pembagian harta waris kepada para ahli waris dengan memperhatikan keadaan ekonomi ahli waris.¹¹⁰

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SF, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian SF menjawab:

Penyelesaian sengketa ini dapat diterima oleh masyarakat, bahkan di pengadilan agama sendiri jarang terjadi perkara waris, hanya ada tentang penetapannya saja atau meminta hitungan saja. Masyarakat lebih dapat menerima hasil musyawarah keluarga yang mengikat bagi mereka para ahli waris yang telah bersepakat dalam penyelesaian sengketa waris dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat formal.¹¹¹

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SF, bagaimana mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian SF menjawab:

Cara yang ditempuh memang merupakan bagian dari sistem musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris (anggota keluarga) dan meminta pendapat dari yang menguasai ilmu waris seperti tokoh ulama, tokoh masyarakat dan juga dosen hukum mawaris. Setelah

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰Wawancara pada tanggal 14 Mei 2018.

¹¹¹*Ibid.*

hitungan waris secara Islam ditentukan barulah mereka menggunakan musyawarah dalam pembagian harta waris sesuai tradisi yang berlaku di masyarakat.¹¹²

h. MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya)

Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:

Tradisi penyelesaian sengketa waris masyarakat kota Palangka Raya cenderung menggunakan musyawarah dalam keluarga tetapi tetap menggunakan hukum Islam juga secara terlebih dahulu untuk menunaikan syariat Islam. Setelah itu barulah dengan jalan damai harta dibagikan sesuai kesepakatan, biasanya dibagi secara adil atau rata saja. Tradisi ini sudah sering digunakan, bahkan rata-rata orang Islam di Palangka Raya menyelesaikan sengketa waris dengan jalan hukum Islam dulu kemudian musyawarah agar terhindar perselisihan dalam keluarga.¹¹³

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MS, apakah penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima oleh para ahli waris?

Kemudian MS menjawab:

Tradisi ini memang diterima masyarakat dan telah dilakukan secara turun temurun, atau biasanya mereka memang sudah dapat menerima secara kekeluarga untuk menghindari perselisihan. Karena bagi masyarakat disini kalau ada sengketa masalah warisan itu menjadi aib yang tidak baik dalam masyarakat.¹¹⁴

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MS, bagaimana mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?

Kemudian MS menjawab:

Biasanya mereka melakukan kumpul keluarga untuk penyelesaian sengketa waris, kemudian berunding dan melakukan musyawarah dengan juga meminta nasehat dari orang-orang yang dituakan. Kemudian dihitung berdasarkan hukum Islam (fiqh mawaris)

¹¹²*Ibid.*

¹¹³Wawancara pada tanggal 20 Mei 2018.

¹¹⁴*Ibid.*

dengan meminta pendapat dari ulama, kantor urusan agama, pengadilan, bahkan juga tokoh masyarakat, setelah itu barulah dibagi kepada ahli waris (anggota keluarga) berdasarkan musyawarah dan bagiannya sesuai kesepakatan dari hasil musyawarah keluarga dan kondisi ekonomi.¹¹⁵

Dari gambaran di atas, tradisi penyelesaian sengketa kewarisan jika dilihat berdasarkan pendekatan sejarah, tradisi penyelesaian sengketa kewarisan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang berada di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, berdasarkan pendekatan konseptual pada dasarnya mengetahui dan mengakui tentang penyelesaian sengketa waris yang dilakukan dengan cara hukum Islam, dan juga melakukan penyelesaian sengketa waris dengan tradisi yang ada yaitu mengutamakan musyawarah dalam menentukan bagian waris dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi seperti keadaan ekonomi dan kebutuhan ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya pola yang berkembang di masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa waris dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat (*local wisdom*) dan mengedepankan prinsip perdamaian. Mencermati fenomena yang terjadi dalam kasus ini, pada dasarnya telah disebutkan dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹¹⁶ yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Katingan dan kota Palangka Raya sangat relevan dengan maksud dari pasal 183 KHI, memberikan arti bahwa para pihak ahli waris tidak boleh melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah sebelum masyarakat mengetahui tata cara pembagian warisan secara hukum kewarisan Islam. Sebaliknya, para ahli waris diperbolehkan melakukan musyawarah setelah

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Lihat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183.

mereka mengetahui bagian hak warisnya baik secara langsung melalui pengetahuan yang mereka miliki tentang hukum kewarisan Islam atau melalui para ahli *faraid* yang menyampaikan kepada mereka.

Berdasarkan paparan mengenai tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yang membagikan harta warisan dengan melakukan penghitungan secara hukum Islam kemudian melakukan musyawarah, maka selanjutnya penulis akan paparkan tentang tradisi penyelesaian sengketa kewarisan melalui praktik atau cara yang dilakukan dalam membagikan harta warisan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga.

Berdasarkan pembagian harta warisan dengan adanya saran dari salah satu atau lebih anggota keluarga yang dituakan atau mengumpulkan seluruh anggota keluarga, sebagaimana disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya).

2. Pembagian warisan dilakukan secara hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah dengan memperhatikan kondisi dan keadaan ekonomi dari ahli wari yang membutuhkan. Karena, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan atau keperluan, serta kondisi ekonomi dari ahli waris yang menerimanya.¹¹⁷ Hal ini terjadi dalam

¹¹⁷Hal ini seperti yang dikemukakan oleh UK, RS, EN, WH, dan JP di Kabupaten Katingan. Selain itu juga dikemukakan oleh TM, PH, AC, NA dan MS di Kota Palangka Raya.

tradisi dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya .

3. Cara yang digunakan menurut para informan dengan terlebih dahulu menggunakan hukum Islam kemudian melakukan musyawarah dan kesepakatan keluarga untuk mencegah perselisihan. Pembagian yang dilakukan informan yaitu informan memang melakukan pembagian berdasarkan kekeluargaan ini dengan cara yang selalu dilakukan dikeluarga mereka secara turun temurun menurut para informan di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya).

Tradisi penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat, tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, melainkan selalu didasarkan atas pertimbangan dengan mengingat benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Mencermati pelaksanaan tradisi pembagian harta waris di atas, dikaitkan dengan konsep kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dimasyarakat dan tradisi tersebut merupakan tindakan yang dianggap benar oleh masyarakat setempat maka hal ini dapat dibenarkan jika dilihat dari aspek kesepakatan keluarga dan tidak terjadi pertikaian dalam pembagian warisan tersebut.

Dicermati melalui hukum Islam tradisi atau kebiasaan, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan istilah Al 'Urf. Sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallab yang dikutip oleh Miftahul Arifin, yaitu:

‘Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan.¹¹⁸

Dari pandangan Khallaf di atas, Arifin menjabarkan bahwa, adat kebiasaan yang berupa perkataan (‘Urf Qauli) misalnya perkataan “Walad” (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan “Lahm” (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan. Selanjutnya ia menambahkan bahwa sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan (‘Urf Amali) seperti jual beli (ba’i) mu’athah yakni jual beli di mana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.

Jika dicermati melalui pendekatan sejarah, selain dengan tradisi atau kebiasaan tradisi, pembagian waris bisa dilakukan dengan wasiat yang terjadi di masyarakat. Jika dihubungkan dengan hukum wasiat dalam Islam, maka syariat Islam yang terkait dengan hukum-hukum wasiat lebih dahulu diturunkan. Dan pada masa awal, ada periode di mana hukum waris belum turun dan juga belum berlaku. Sehingga di masa itu, segala hal yang terkait dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, semuanya ditetapkan berdasarkan wasiat almarhum semasa hidupnya.

Sebagaimana firman Allah, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ^ط

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-

¹¹⁸Miftahul Arifin dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

¹¹⁹QS. Al-Baqarah: 180.

bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹²⁰

Dengan adanya ayat di atas, sebenarnya tidak terlalu salah ketika di dalam keluarga ada yang selalu berupaya agar wasiat dari orang tua wajib dijalankan, sebab ayat di atas mewajibkan orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberikan wasiat kepada yang ditinggalkan dan hal itu berkaitan dengan harta yang dimiliki pemberi wasiat. Dan pada saat ayat ini turun, berlaku hukum kewajiban untuk menjalankan wasiat. Dan siapa yang melanggar wasiat al-marhum, tentu dia akan berdosa besar.

Namun ada pengecualian terhadap kewajiban dalam melaksanakan wasiat ini, yakni terdapat pada ayat setelahnya yaitu Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

(akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku beraf sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada dasarnya, asbabun nuzul¹²¹ Al-Baqarah ayat 180 dan 182 adalah sesungguhnya masyarakat Jahiliyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan mempamerkan (riya') dan agar terkenal (mencari kemasyhuran), serta mencari kebesaran dan kemuliaan. Dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Kemudian Allah SWT. menurunkan ayat ini pada awal Islam, serta mengembalikan hak yang diberikan orang-orang yang jauh kepada sanak kerabat yang dekat, hal

¹²⁰Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, h.56

¹²¹Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 478-479.

tersebut dilakukan untuk mencari kebaikan dan hikmah. Ada pendapat yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat tentang waris pada QS. An-Nisā', maka sekarang tidak diwajibkan seseorang berwasiat kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh dan jika ada yang berwasiat pada orang yang dekat atau orang yang jauh maapkan mereka bukan termasuk dalam orang-orang yang menerima waris. Selain itu, apabila pemberi wasiat diduga akan keliru atau berlaku tidak adil dalam menetapkan wasiatnya baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka orang yang mengetahui hal itu boleh mendamaikan antara pemberi wasiat dan orang yang diberi wasiat, atau antara para ahli waris dan orang-orang yang diberi wasiat, dengan cara mengembalikan wasiat itu kebatas keadilan dan ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat, dan tidak ada dosa dalam pengubahan ini, sebab pengubahan ini dilakukan dengan dasar kebenaran. Pelaku pengubahan ini tidak berdosa, dan Allah Maha mengampuni orang yang mengubah dengan tujuan untuk mendamaikan, dan *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.

Berbeda dalam hukum waris adat, penunjukkan dalam penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada ahli waris. Maka dengan demikian hal tersebut merupakan perbuatan penunjukkan yang dilakukan pewaris kepada ahli warisnya atas hak dan harta tertentu, namun berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu sangat diperlukan adanya orang-orang yang mempelajari dan

mengajarkannya kepada masyarakat, dan selanjutnya masyarakat dapat merealisasikannya di dalam pembagian warisan.¹²²

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah *wajib kifayah*. Artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu *farâi*□ sebagaimana mempelajari dan mengajarkan alquran.

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al Qasim, dia berkata, Abdullah berkata: "pelajarilah alquran dan *faraid*, sebab seseorang akan membutuhkan ilmu yang telah dia pelajari atau dia berada disuatu kaum yang tidak mengetahui." (HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan Ad-Daruquthni)¹²³

Hadis di atas menempatkan perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraid* sejalan dengan perintah mempelajari dan mengajarkan alquran. Ini tidak lain menunjukkan bahwa ilmu *faraid* merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Lagi pula tidak jarang, naluri manusia cenderung materialistik, serakah, tidak adil dan mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan hak-haknya sendiri. Maka di sinilah letak pentingnya kegunaan ilmu mawaris, hingga wajib dipelajari dan diajarkan. Agar di dalam pembagian warisan, setiap orang mentaati ketentuan yang telah diatur dalam alquran secara detail. Oleh karena itu, dilihat dari satu sisi, mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris dapat berubah statusnya menjadi *wajib 'ain*, terutama bagi orang-orang yang oleh masyarakat dipandang sebagai pimpinan, terutama pemimpin keagamaan.

¹²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, Cet. 3, h. 4-5.

¹²³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, cet. 1, h. 494-495. Lihat juga Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 4*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 1, h. 113-114. Lihat juga Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, h. 547.

Jika dicermati melalui pendekatan sejarah dan konseptual, pembagian harta warisan dibagikan berdasarkan kekeluargaan kepada ahli waris setelah dibagikan secara hukum Islam yaitu di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), AC (Ahli Waris/Sebangau), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya). Para informan yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara tersebut merupakan pola yang terjadi dari tradisi masyarakat yang telah turun temurun dilakukan dan dianggap memiliki keyakinan psikologis dan dilakukan berulang-ulang sebagai bagian dari kearifan masyarakat lokal.

Secara konseptual hukum kewarisan pada masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dapat menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar terhindar dari konflik yang kemungkinan akan terjadi. Di dalam hukum Islam ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh pewaris ketika adanya pembagian harta waris, yakni menciptakan ketentraman hidup orang-orang yang melaksanakannya dan membangun nilai-nilai keadilan yang paling tinggi. Jika keadilan ini akan diterapkan maka secara otomatis akan mencegah muncul berbagai konflik dalam keluarga atau masyarakat.¹²⁴

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebut dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 7 yang

¹²⁴Syarif Dahlan dan Iwan Haryanto, *Eksistensi ADR dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No.2, Agustus 2018, h. 324.

menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 surat an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176). Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam dua bentuk. Pertama: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ayah dengan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat an-Nisa. Begitu pula dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam. Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami/istri, anak, bapak dan ibu maka berlaku surat an-Nisa' ayat 12. Kedua: laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang di dapat oleh perempuan yaitu: anak laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat an-Nisa.¹²⁵

Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34. Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan lagi kepada

¹²⁵Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Gender Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, t.th, h. 37.

wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas wanita. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Walaupun kerabat garis ke atas, yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surat An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah yang diterima. Anak rata-rata mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya. Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua. Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya.¹²⁶

Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pembagian harta warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang kecil tidaklah adil, tetapi tinjauan dari kebutuhan tidak bersifat saat dilangsungkannya pembagian harta warisan tetapi untuk jangka waktu yang lama sampai pada usia dewasa, yang kecil membutuhkan materi yang sama banyaknya dengan orang yang sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan besarnya keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya keduanya akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sama rata.¹²⁷

¹²⁶*Ibid*, h. 38-39.

¹²⁷*Ibid*, h. 38-39.

Warisan yang dibagikan adalah berupa barang yang dimiliki pewaris yang jika langsung dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam perlu dilakukan upaya musyawarah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan adanya misi saling tolong menolong dalam harta warisan kepada ahli waris yang memiliki kondisi ekonomi yang membutuhkan dan memerlukan bantuan yang bersifat materi. Jelas terlihat sifat kekeluargaan dalam hukum waris yang terjadi dalam tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Adanya gabungan hukum Islam dan hukum adat menunjukkan keadaan yang pluralistik (beragam). Hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerd dan hukum adat. Keanekaragaman hukum ini masih ditambah lagi hukum waris adat yang berlaku yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat.¹²⁸ Akibatnya bentuk dan sistem kewarisan di Indonesia mengalami pluralisme hukum kewarisan yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan rasa keadilan masing masing.

Pluralisme sistem kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya tampak dalam hukum kewarisan yang digunakan yaitu hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata yang bersumber dari KUHPerd dan hukum waris adat yang bersumber dari hukum yang hidup di masing-masing daerah. Hukum kewarisan Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara

¹²⁸Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, h. 554-555.

Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Bila dicermati dari tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam pandangan hukum Islam mempunyai tujuan yaitu agar dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama dan jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagian dari ahli waris yang lain. Selain itu, pembagian harta warisan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat disekitarnya. Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu dengan kebiasaan menyelesaikan dengan musyawarah kemudian menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah untuk menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung yaitu melalui ilmu *faraid* dan tradisi kearifan lokal, penulis menyebutnya sebagai *due procces dispute resolution kewarisan* atau kompromi penyelesaian sengketa waris dengan tetap melakukan sesuai syariat Islam (*faraid*), kemudian dilakukan musyawarah.

Mentalitas masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya tetap membagi waris secara Islam, kemudian didaur ulang harta dan digabung nilai kemanusiaan (*humanis*), sebab fakta ilmiah tradisi penyelesaian sengketa kewarisan terikat aspek ibadah yang tetap menjalankan hukum Islam dalam aspek kewarisan kemudian ketentuan tersebut dimodifikasi melalui nilai kemanusiaan dalam konteks hukum keluarga (*family recht*) yang melahirkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu *due procces dispute resolution kewarisan* dalam arti terpenuhinya pelaksanaan pembagian waris sesuai hukum Islam kemudian melaksanakan musyawarah dengan mengutamakan aspek maslahat.

Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu kebiasaan

menyelesaikan dengan musyawarah kemudian menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah untuk menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut merupakan cerminan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai “budaya” berupa “adat-istiadat” yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum Adat. Sedangkan istilah “adat” berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. Adat dapat juga diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana hukum Adat atau *Adatrecht* dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan. Selain itu, A. Qodri Azizy memberikan konsepsi secara dinamis bawa hukum Adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “hukum kebiasaan” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau Adat-istiAdat bangsa Indonesia yang telah dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku. Demikian juga Sorjono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.¹²⁹

Jadi dalam tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dilakukan dengan cara yang digabung, *due procces dispute resolution kewarisan*, (bahasa temuan fakta ilmiah) kompromi penyelesaian sengketa waris, tetap melakukan sesuai syariat *faraid*, kemudian melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan jalan perdamaian dan memperhatikan prinsip tolong menolong.

¹²⁹ Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015, h. 158.

C. Keberlakuan Hukum Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Tradisi Masyarakat Kalimantan Tengah Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa semua informan beralasan dengan melakukan pembagian harta warisan yang berdasarkan kesepakatan antar ahli waris yang mana dilakukan atas saran ahli waris yang paling dominan maka dapat dikatakan cara yang informan lakukan adalah pembagian harta warisan secara adat. Adapun bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris tidak sama dan ada pula yang membagi harta warisan tersebut dengan sama rata serta ada pula yang hanya membagikan harta warisan tersebut kepada salah satu ahli waris yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, berikut ini adalah penjelasan hukum mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut hukum kewarisan salah satu sebab terjadinya waris mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan atau nasab¹³⁰ yaitu hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewarisi jika salah satu meninggal dunia. Adapun hubungan tersebut yang ada ikatan nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman, cucu dan seterusnya yang intinya adalah orang tua, anak dan orang yang bernasab dengan mereka. Konteksnya dengan pandangan ahli waris agar membagi harta secara kekeluargaan tersebut secara logika sekilas tidak bermasalah, namun jika dicermati dalam sudut adanya ahli waris yang terhibab dalam menerima waris, maka praktik pembagian waris secara kekeluargaan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat muslim Kecamatan Jekan Raya memberi kesan seakan tidak mengindahkan adanya ketentuan tentang *hijab nuqsan* dan *hijab hirman*, yaitu bahwa ada diantara ahli yang terhalang tidak berhak menerima harta warisan.

Untuk memahami istilah terhibab dalam hukum kewarisan Islam, terlebih dahulu peneliti mengulas istilah kata *hijab* yaitu menurut bahasa adalah

¹³⁰Lihat, A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Cet. 1, h. 8.

penutup atau penghalang dari memperoleh warisan. Sedangkan menurut istilah adalah beberapa kerabat yang terhalang menerima warisan.¹³¹ Dalam fikih mawaris, istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang menghalangi disebut sebagai *hajib*, dan ahli waris yang terhalang disebut dengan *mahjub*.¹³² Dan bila dilihat dari akibatnya, ada dua macam *hijab* yaitu *hijab nuqsan* dan *hijab hirman*. Berikut ini peneliti jabarkan penjelasan dari kedua *hijab*.

Hijab nuqsan adalah *hijab* yang dapat mengurangi bagian harta seseorang dari banyak menjadi sedikit, tetapi tidak sampai membuatnya tidak mendapat harta warisan.¹³³ Adapun perubahan bagian dalam *hijab nuqsan* terjadi pada suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, dan saudara perempuan seayah.¹³⁴

Hal tersebut berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub*. Seperti, suami yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{2}$, karena ada anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan maka terjadi pengurangan bagian yang diterimanya yaitu menjadi $\frac{1}{4}$. Istri yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{4}$ karena ada anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan, maka terjadi pengurangan bagian yang diterimanya yaitu menjadi $\frac{1}{8}$. Demikian halnya, saudara kandung, saudara perempuan seayah, ibu serta cucu perempuan dari anak laki-laki yang mendapatkan pengurangan dalam bagian yang akan diterima.

Adapun untuk bagian yang seharusnya diterima saudara kandung itu adalah $\frac{1}{2}$ jika ia seorang, tetapi jika ia berjumlah 2 orang atau lebih mendapat bagian $\frac{2}{3}$, dan itu dapat berkurang, karena bersamaan dengan adanya anak atau cucu perempuan. Maka setelah terjadi pengurangan bagian untuk saudara

¹³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A. B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2003, Cet. 10, h. 568.

¹³²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, Cet. 4, h. 89-90.

¹³³M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, h. 104.

¹³⁴Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Alih bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet. 1, h. 280.

kandung baik itu seorang atau lebih adalah '*ashabah ma'alghair*. Kemudian untuk bagian saudara perempuan seayah adalah $\frac{1}{2}$, karena ia bersamaan dengan seorang saudara perempuan kandung maka berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{6}$. Sedangkan bagian ibu yang seharusnya mendapat $\frac{1}{3}$, karena bersamaan dengan anak atau cucu maupun bersamaan dengan 2 saudara atau lebih, maka berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{6}$. Demikian juga yang terjadi pada cucu perempuan dari anak laki-laki yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{2}$ karena bersamaan dengan seorang anak perempuan maka bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$.¹³⁵

Hijab hirman adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Sehingga apabila seseorang terkena *hijab hirman*, maka ia tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Berikut adalah ahli waris yang terkena *hijab hirman*, yaitu:

1. Kakek yang terhalang mendapatkan hak warisnya karena adanya ayah.
2. Nenek dari garis ibu terhalang karena adanya ibu.
3. Nenek dari garis ayah juga terhalang karena adanya ayah dan ibu.
4. Cucu laki-laki dari garis laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki.
5. Cucu perempuan dari garis laki-laki yang berjumlah seorang atau lebih terhalang karena adanya anak laki-laki atau anak perempuan 2 atau lebih.
6. Saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung (seorang, atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah.
7. Saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah (seorang, atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, Saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung bersama anak atau cucu perempuan.
8. Saudara laki-laki atau perempuan seibu (seorang atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan maupun karena adanya ayah dari kakek.

¹³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 90.

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'ashabah ma'alghair*.
10. Anak laki-laki dari saudara seayah terhalang karena adanya anak atau cucu laki-laki, maupun adanya ayah.¹³⁶

Dari pembahasan secara hukum kewarisan Islam di atas, maka pembagian yang disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya) bahwa pembagian yang mereka lakukan s terlebih dahulu dengan sistem pembagian warisan secara ilmu *faraid*, untuk selanjutnya baru pihak keluarga bermusyawarah untuk memilih cara pembagian warisan mana yang disepakati, yaitu berdasarkan kesepakatan musyawarah kekeluargaan.

Secara konseptual keberlakuan tradisi penyelesaian sengketa kewarisan yang disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan

¹³⁶*Ibid.*, h. 91.

Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya) yaitu dengan terlebih dahulu membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris adalah bagi dahulu sesuai dengan hukum Islam, selanjutnya setelah dipastikan masing-masing telah memiliki hak sepenuhnya atas harta waris, setelah dipastikan harta warisan itu terbagi dengan benar dan sah, selanjutnya jika dari masing-masing keluarga ahli waris ingin saling membantu saudaranya yang mendapat jatah yang kecil atau bahkan ingin memberikan semua haknya dari harta warisan.

Secara konseptual adanya aturan ketentuan pembagian warisan secara terperinci dalam Islam agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Sebab, syariat Islam menghendaki adanya pembagian harta warisan yang adil dan keadilan tersebut merupakan salah satu sendi pembinaan yang dapat ditegakkan. Adapun tujuan utama dari pembagian harta warisan secara hukum Islam adalah agar dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang pembagian warisan yang berhak, sehingga tidak terjadi adanya seseorang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Sebab, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya telah terlepas dari pada hak miliknya dan berpindah menjadi milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahli warisnya.

Sedangkan cara yang dilakukan disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RJ (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut),

MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya) berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antar ahli waris yang mana dalam hal ini untuk mencegah perselisihan dan juga mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan ahli waris sesuai dengan keadaannya atau dengan kata lain memperhatikan kemaslahatan ahli waris lainnya.

Jadi secara konseptual warisan dibagi dahulu sesuai dengan hukum Islam (*faraid*), selanjutnya pastikan masing-masing telah memiliki hak sepenuhnya atas harta waris, setelah dipastikan harta warisan itu terbagi dengan benar dan sah, selanjutnya jika dari masing-masing keluarga ahli waris ingin saling membantu saudaranya yang mendapat jatah yang kecil atau bahkan ingin memberikan semua haknya dari harta warisan itu, kondisi yang demikian boleh dilakukan dan masuk dalam perbuatan tolong menolong dengan sesama yang dibenarkan dalam Islam, asalkan setelah harta waris tersebut dibagi terlebih dahulu dengan benar berdasarkan ilmu *faraid* dalam rangka melaksanakan syariat Islam atau dalam konteks otoritas hukum Islam dalam hal kewarisan.

Secara konseptual bagi umat Islam merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat yang ditunjuk oleh *nas-nas* yang *sarih*. Allah SWT. menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris. Dia memperincinya secara umum dan menjelaskan ayat-ayat dari awal surat an-Nisa sampai akhirnya sehingga ilmu *faraid* disebut sebagai bagian dari ketentuan-Nya. Maka jelaslah bahwa umat Islam wajib menaati ketentuan Allah dalam pembagian waris ini. Setelah menjelaskan hukum-hukum waris, Allah SWT. berfirman dalam surat an-Nisa ayat 13-14 yang menceritakan tentang janji Allah bagi orang-orang yang tunduk dalam menjalankan ketentuan waris tersebut serta ancaman bagi hamba-Nya yang menyalahi batasan yang telah ditentukan, baik menambah, mengurangi, maupun tidak memberikan bagian bagi ahli waris yang berhak dan malah memberikannya kepada yang tidak berhak. Selain itu Rasulullah SAW. juga memerintahkan

agar umat Islam membagi harta warisan menurut ketentuan dalam al-Qur'an dalam sabdanya: "*Bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah (Alquran)*".¹³⁷

Terkait dengan motif membantu dalam pembagian waris dengan musyawarah yang dilakukan dalam tradisi masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya perbuatan saling membantu keluarga yang tidak memiliki harta yang memadai, kondisi yang demikian ini disebut dengan tolong menolong. Anjuran untuk saling tolong menolong ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, daripadanya Abu Hurairah RA. daripadanya Nabi SAW. bersabda "siapa yang menolong seorang mukmin dari satu kesusahan dari berbagai kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari berbagai kesusahan serta kesusahan-kesusahan lainnya di hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah bagi orang susah, niscaya Allah akan mempermudahnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup ke'aiban seorang muslim, niscaya Allah akan menutup ke'aibannya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa bersedia menolong hamba-Nya selagi dia suka menolong saudaranya. Barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudah baginya suatu jalan menuju ke surga. Sekelompok orang tidak berkumpul mereka disalah satu rumah-rumahnya Allah (mesjid) seraya mereka membaca Kitab Allah (alquran) dan menelaahnya dengan seksama secara bersama-sama dengan suasana penuh ketenangan sehingga turun rahmat Allah kepada mereka semua yang hadir dan mereka akan di kelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyatakan bahwa mereka termasuk orang-orang yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang terlambat amalannya, niscaya nasab keturunannya tidak mampu mempercepatkannya."¹³⁸

¹³⁷ Siti Muna Hayati, *Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris*, Alhukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, h. 11.

¹³⁸ Lihat, Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Ibnu Majah Jilid 1*, alih bahasa Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. 2, h. 123. Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, cet. 1, h. 363.

Penerapan hukum Islam termasuk hukum kewarisan dapat terjadi tidak sesuai dengan tekstualnya, apalagi yang berhubungan dengan perkembangan dari tekstual dalam ayat-ayat Alquran yang pokok-pokoknya saja. Dalam hukum kewarisan tentang ahli waris Alquran hanya mengatur ayah, ibu, suami. Istri dan anak, di luar itu tidak diatur. Sehingga dikembangkan oleh para ahli hukum Islam seperti ahli waris kakek, nenek, cucu dan lain sebagainya. Dalam konteks pengembangan hukum kewarisan Islam di setiap negara atau daerah terpengaruh oleh corak budaya adat-istiadat kehidupan masyarakat suatu negara atau daerah dimana hukum kewarisan diberlakukan. Pengembangan hukum kewarisan Islam dan budaya adat-istiadat kekerabatan patrilineal, akan berbeda dengan budaya adat-istiadat kekerabatan parental atau bilateral. Hal ini terjadi seperti penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang mayoritas menganut sistem budaya adat-istiadat parental atau bilateral yaitu yang memberikan hak kepada setiap kerabat dalam jarak tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Lain halnya dengan budaya yang menganut adat-istiadat sistem patrilineal sudah barang tentu yang berhak mendapat harta kewarisan, terbatas pada kerabat laki-laki, sedangkan pihak perempuan bukan sebagai ahli waris.¹³⁹

Dengan demikian sebagai pemenuhan otoritas hukum Islam, dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya juga menjalankan syariat Islam yang telah diterangkan dalam Alquran dan sunnah dengan meminta pendapat dari tokoh atau ulama yang memahami ilmu *faraid* kemudian melakukan musyawarah dengan kesepakatan membantu ahli waris lain dalam konteks ekonomi (harta/mal). Dengan kata lain tolong menolong dengan sesama sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam harus dijalankan, sedangkan yang dilarang harus ditinggalkan. Begitu pula yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi yang berhak menerima, harus dijalankan agar tidak terjadi perselisihan yang

¹³⁹Komari, *Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 3, November 2012, h. 465.

juga menjadi tujuan syariat dalam menjalankan perintah Allah SWT dalam konteks memelihara agama (*hifzul din*). Selain itu hikmah waris itu sendiri sangatlah besar, yakni memperkuat hubungan silaturahmi sesama keluarga. Pada prinsipnya warisan itu sangat berguna sekali bagi manusia agar terjadi kerjasama, saling menyayangi dan memberikan manfaat kepada kerabat ahli waris yang ditinggalkan untuk mengenang kebaikan si pemilik harta yang telah meninggal dunia juga termasuk dalam konteks memelihara harta (*hifzul mal*) yang membawa misi sosial ekonomi.

Jika dicermati berdasarkan pendekatan perundang-undangan tradisi penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara konseptual dalam hukum nasional, telah diatur dalam hukum waris sebagaimana KUH Perdata bagian V tentang hukum waris. Harta waris adalah harta peninggalan orang tua untuk anak-anak yang ditinggalkan sebagai penerus atau ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia. Menurut Hilman Hadikusuma, di dalam KUH Perdata (*BW*) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun demikian Pasal 830 KUH Perdata (*BW*) menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUH Perdata (*BW*) ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan, sehingga harus ada orang yang meninggal dunia, pertama-tama tentulah apa yang dinamakan kematian alami (*naturlijke dood*).¹⁴⁰ Lebih lanjut dalam Pasal 883 KUH Perdata (*BW*) menyebutkan bahwa adalah sah pula, suatu penetapan wasiat, dengan mana mengenai sesuatu kebendaan hak pakai hasilnya diberikan kepada orang yang satu, sedangkan hak milik semata-mata atas kebendaan itu diberikan kepada orang yang lain.

¹⁴⁰ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, h. 24-25.

Selain itu menurut Pitlo disebutkan bahwa hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara keluarga itu sendiri maupun dengan pihak ketiga. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara para ahli waris dengan pihak ketiga.¹⁴¹

Seperti diungkapkan Hazairin dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lajim disebut meninggal dunia. Selain hukum waris barat yang tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum yang mengatur pembagian harta warisan yaitu *pertama*, hukum Waris Islam merupakan ketentuan Alquran dan hadis. Penggunaan hukum waris Islam tergantung pada keimanan seseorang, dengan demikian, maka keyakinan akan keimanan merupakan faktor utama. *Kedua*, hukum waris Adat yang beraneka ragam, tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri.¹⁴²

Begitu juga dalam konteks penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara konseptual

¹⁴¹ Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, h. 24.

¹⁴² *Ibid.*, h. 25.

masalah pewarisan sebagai hukum yang mengatur peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan bidang hukum yang bersifat sensitif, oleh karena itu pembagian terhadap harta warisan tersebut dapat dilakukan berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, serta atas dasar kesepakatan para pihak. Keluarga adalah faktor paling penting dalam kehidupan, dimana keluarga menjadi tempat dalam anggotanya berinteraksi satu sama lain di sekitar lingkungan sehari-hari, dan dapat diketahui bahwa dalam suatu keluarga terdapat komponen anak yang memiliki peran penting menjadi penerus keluarga atau dapat dikatakan sebagai ahli waris dan penerus harta yang menjadi peninggalan orang tuanya kelak setelah orang tuanya meninggal. Agar harta peninggalan tersebut terjaga dan dapat digunakan dengan baik tanpa menimbulkan sengketa bagi penerusnya kelak, maka pembagiannya harus sesuai hukum yang berlaku. Berlandaskan pada hal tersebut, dalam suatu keluarga dapat dibenarkan untuk melakukan pembagian harta warisan dengan didasarkan pada kesepakatan dari pewaris maupun ahli waris, salah satu bentuknya dengan cara melakukan pembagian warisan dengan jumlah yang sama tanpa memperhatikan status penerima warisan apakah seorang laki-laki maupun perempuan, hal ini yang juga terjadi sebagai tradisi penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dan pada kehidupan sehari-hari, sering terjadi sengketa dan masalah-masalah yang timbul ketika pembagian harta warisan dilaksanakan. Adapun yang dimaksud sengketa menurut Duene Ruth Hefelbower adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Penyelesaian sengketa berkenaan dengan waris dapat dilakukan dengan cara hukum waris

Islam, hukum waris barat dan hukum waris adat.¹⁴³ Jika dicermati lebih lanjut tradisi penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya memiliki legitimasi hukum Islam, hukum waris barat dan hukum waris adat. Sebab, telah dilakukan skema pembagian secara hukum Islam dan juga dikembangkan dengan tradisi atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat dengan keberlakuan hukum adat, dan juga memiliki legalitas dalam hukum positif.

Selain itu, Ter Haar berpendapat bahwa hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan keturunannya.¹⁴⁴ Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya juga merupakan kebiasaan yang terjadi secara turun temurun yang dilakukan berulang-ulang dan diyakini menjadi hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat untuk mencegah terjadinya perselisihan dan mengutamakan perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT. antara lain dalam surat an-Nisa ayat 35, surat an-Nisa ayat 114, surat al-Hujurat ayat 9-102, hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmizi serta ijma". Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak mampu menyelami fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, bahkan kenyataan ini dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terdapat istilah mediasi yang berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁴⁵

Selain itu jika dilihat melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hukum adat merupakan sistem hukum non-statutair

¹⁴³*Ibid.*, h. 25-26.

¹⁴⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 67.

¹⁴⁵Siti Muna Hayati, *Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris*, Alhukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, h. 2.

yang diciptakan oleh Snouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, di mana hukum Adat beruratberakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal. Sedangkan hukum syariat adalah seperangkat peraturan atau hukum ilahiyah yang bersumber kepada alquran dan sunnah, serta memuat norma-norma hukum universal baik yang bersifat dimensi vertikal maupun horizontal. Term umum yang biasa disebut syariat terbentuk dari beragam produk hukum hasil pemikiran para ulama (fiqh), yang kemudian ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui proses kodifikasi (*taqnin*), hingga hukum Islam itu menjadi hukum positif. Kolaborasi antara kedua hukum itu mengakibatkan adanya pandangan bahwa hukum Adat merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), dan berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, di mana kebiasaan yang merupakan Adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Namun hukum dalam bentuk ini juga dapat dijumpai di setiap negara termasuk negara maju, dan di negara-negara Islam, dalam hukum Islam disebut "*al-'urf*" atau "*al-'adah*".¹⁴⁶

Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat dan mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Alquran dan hadis, hukum perdata yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Hukum waris adat sendiri terbagi menjadi hukum waris adat yang masing masing daerah berbeda beda. Sebagai akibat keadaan yang dikemukakan

¹⁴⁶Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015, h. 157-158.

tersebut maka hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Pilihan hukum untuk menentukan hukum kewarisan ini didasari oleh pluralisme hukum kewarisan yang diakui di negara Indonesia.¹⁴⁷

Jika dilihat melalui pendekatan perundang-undangan maka hukum kewarisan Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan. Selanjutnya pada ayat 3 menyatakan “bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”. Melihat Pasal ini jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam (Muslim) secara formal (hukum acara) wajib tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Nomor 3 Tahun 2006.

Selain dengan menggunakan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa waris juga mengakui adanya jalur non litigasi (di luar pengadilan) menggunakan *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Para pihak dalam penyelesaian sengketa harta waris melalui jalur *alternative dispute resolution* (ADR), baik dalam bentuk menggunakan jalur mediasi, negosiasi, konsultasi, fasilitasi, dan lain-lain. Kebolehan penyelesaian perkara diluar pengadilan diatur berdasarkan pasal 1851, 1855, 1858 KUH Perdata, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa

¹⁴⁷Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, h. 554-555.

dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase dan musyawarah mufakat atau perdamaian (*islah*).¹⁴⁸ Penyelesaian menggunakan *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian yang secara tidak langsung sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yang tertanam rapi dan dibudayakan dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa menggunakan *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa sangat mudah dipahami, sederhana dan cepat dalam menyelesaikan sengketa, terutama sekali sengketa harta waris yang terjadi di masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Penyelesaian dengan perdamaian/musyawarah sebelum maupun setelah terjadinya perselisihan, telah menjadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan, hal ini dalam praktik di dalam masyarakat bangsa Indonesia telah dilaksanakan sejak dahulu kala oleh tetua bangsa Indonesia. Sehingga penyelesaian dengan perdamaian menjadi acuan penyelesaian sebelum maupun setelah terjadi perselisihan, baik di dalam masyarakat atau di luar pengadilan maupun di pengadilan. Penyelesaian dengan perdamaian di pengadilan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008. Dimana hakim sebelum mengadakan pemeriksaan wajib mendamaikan pihak-pihak yang sengketa, dan pada waktu sidang pertama hakim wajib menunjuk mediator untuk melaksanakan perdamaian dengan cara mediasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hukum Islam salah satu pertimbangan penerapan hukum kewarisan Islam, adalah dengan cara perdamaian seperti diajarkan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai sarana penyelesaian untuk menghindari timbulnya perselisihan atau terjadinya perselisihan yang sedang berlangsung. Sebab dengan cara perdamaian ini akan memuaskan para pihak ahli waris dan mempererat tali silaturahmi serta

¹⁴⁸Syarif Dahlan dan Iwan Haryanto, *Eksistensi ADR dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No.2, Agustus 2018, h. 325.

menjadikan ketenangan jiwa masing-masing ahli waris. Bahkan dengan perdamaian terjadi saling tolong-menolong di antara para ahli waris, bagi ahli waris yang mampu, akan meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu. Karena ahli waris yang mampu tersebut menggugurkan atau menyerahkan hak milik dari kewarisannya, baik sebagian maupun seluruhnya kepada ahli waris yang lain.¹⁴⁹

Dalam hukum Islam perdamaian pada umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah, baik yang belum terjadi perselisihan maupun telah terjadi perselisihan. Perdamaian para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mempunyai tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari di antara ahli waris sebagai anak-anak maupun para keluarga dekat pewaris. Bahkan penyelesaian dengan perdamaian ini para ahli waris tidak memerlukan alat-alat bukti dan para ahli waris memperoleh kebebasan mencari jalan keluar yang disepakati agar dapat menyelesaikan pembagian harta warisannya. Perdamaian tersebut dalam istilah hukum Islam disebut Al-Shulh, bahkan dalam hukum Islam al-shulh atau perdamaian ini telah menjadi kaidah ushul fiqh, yang disebut *Al-suhulh sayyidul al-ahkam*, artinya perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum. Menurut Syahrizal Abbas bahwa memilih perdamaian itu berdasarkan pertimbangan (1). Dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa menang atau kalah dalam penyelesaiannya, (2). Dengan perdamaian ini dapat menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta mempererat silaturahmi, dan (3). Dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan, dan para ahli waris membuat kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian.¹⁵⁰

Penyelesaian pembagian harta kewarisan dengan cara perdamaian selain menyelesaikan masalah yang terjadi di antara keluarga ahli waris, juga merupakan bentuk tolong menolong atau di antara ahli waris-ahli waris yang

¹⁴⁹Komari, *Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 3, November 2012, h. 472-473.

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 479.

mampu akan meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu. Dalam hukum Islam cara seperti ini teori *ibra* atau pembebasan hak miliknya yang merupakan harta kewarisan, baik sebagian maupun seluruhnya, kemudian hak milik harta kewarisan itu menjadi hak milik ahli waris lainnya. Dalam hukum Islam istilah *ibra* masdar dari kata yang artinya membebaskan. Kata *ibra* ini dalam hukum Islam mempunyai dua pengertian *isqot* dan *tamlik*. Kata *isqad* masdar dari kata *asqatha* yang artinya menggugurkan, melepaskan dan membebaskan. Dengan demikian *isqot* adalah menggugurkan hak miliknya dari bagian harta warisannya. Sedangkan kata *tamlik* masdar dari *mallaka* yang artinya menjediakan miliknya juga dapat diartikan menyerahkan atau memberikan hak kepada seseorang. Sehingga *tamlik* adalah menyerahkan bagian harta warisannya. Apalagi para ahli waris itu merupakan hubungan keluarga dekat, baik dalam sistem keluargaan parental atau bilateral, kekeluargaan matrilineal maupun kekeluargaan patrilineal. Dengan demikian perdamaian merupakan instrumen yang paling baik dalam menyelesaikan perselisihan dan perseteruan, permusuhan keluarga dalam menjaga keutuhan keluarga atau kekerabatan serta kerukunan dalam masyarakat.¹⁵¹

Jika dilihat dari pendekatan konseptual maka keberlakuan hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris seperti yang terjadi dalam tradisi masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, bagi yang beragama Islam tunduk terhadap hukum Islam kemudian melakukan hukum waris adat. Sebab, dalam sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan teritorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial). Dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat

¹⁵¹*Ibid.*, h. 482.

satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum teritorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.

Sementara titik singgung antara hukum Islam dengan hukum adat terletak pada pandangan adanya "keistimewaan" antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dengan sistem matrilineal, lebih mengedepankan anak perempuan, sementara hukum waris dalam madzhab sunny (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) cenderung bersifat patrilineal. Perbedaan yang cukup tajam antara hukum Islam dan KUHPerdara adalah anak laki-laki berbanding sama dengan anak perempuan. Adapun tertib keluarga yang menjadi ahli waris dalam KUHPerdara, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi;
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;

4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.¹⁵²

Harus diakui bahwa ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak selamanya berjalan beriringan. Para ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. Cristian van den Berg pernah mengeluarkan teorinya dengan *reception in complexu* yang menyatakan bahwa hukum agama adalah hukum adat di mana hukum adat telah meresepsi hukum Islam. Teori ini kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronje dengan teori *receptie*. Teori ini menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah diterima oleh hukum Adat. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (*judge made law*).¹⁵³

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan teritorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial). Dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum teritorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena

¹⁵²Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 67.

¹⁵³*Ibid.*, h. 70.

mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama. Persekutuan geneologis disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi territorial dan geneologis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Euri di Minangkabau disebut dengana Nagari dan di Batak disebut Kuriā atau Hutā. Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan) dan parental (bapak-ibu).¹⁵⁴

Menurut sistem patrilineal ini keturunan diambil dari garis bapak, yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga ayahnya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan Timor. Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan. Sementara matrilineal adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur. Sesuai dengan persekutuannya, matrilineal lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah. Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutuan ini (bilateral). Golongan

¹⁵⁴Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 56-57.

masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.

Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Cara ini dianggap merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus.

Secara legal formal di Indonesia cara seperti ini diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.* Menurut cara ini persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan *faraid* yang telah dijelaskan oleh alquran dan sunnah dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu. Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak

tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.¹⁵⁵

Adanya variasi itu karena terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, (lihat al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 11 dan 12). Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktik belum seluruhnya masyarakat meresepsi hukum warisan Islam. Hal ini dikarenakan umat Islam di Jawa khususnya di pedalaman Islam dikembangkan dengan tafsir sifustik yang mementingkan hakekat dari pada syariat yang kemudian membentuk budaya kebatinan atau sering disebut "kejawen". Dengan demikian menurut H. Simuh bahwa umat Islam di pedalaman Jawa meskipun sejak abad ke 13 telah beragama Islam, tetapi masih mendukung nilai-nilai budaya lama (animisme dan Hinduisme). Di samping itu tentunya dakwah Islam berhubungan dengan hukum-hukum keluarga, khususnya hukum warisan belum optimal dilakukan oleh para jura dakwah, sehingga pengetahuan hukum warisan belum dipahami betul oleh umat Islam di daerah pedalaman. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa penyampain ajaran Islam lebih banyak mengenai ibadah mahdloh, kebanyakan yang berkaitan shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Sementara itu pemerintah Hindia Belanda telah menjajah Indonesia kurang lebih selama 350 tahun, sehingga tidak mungkin mereka tidak membawa sistem hukumnya untuk diberlakukan di Indonesia. Sistem hukum yang diberlakukan adalah sistem hukum kontinental yang telah diterangkan di muka, bahwa untuk sistem hukum perdata, khususnya hukum warisan yang telah dikodifikasikan, yaitu Burgerlijk Wetboek.¹⁵⁶

¹⁵⁵Fatahuddin Azis Siregar, *Pembagian Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jurnal Fitrah, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, h. 119-120.

¹⁵⁶Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015, h. 166.

Hukum Perdata Barat (BW) meskipun tidak sesuai dengan kondisi negara Indo-nesia, namun untuk menghindari kekosongan hukum bagi warga negara keturunan asing, tetap diberlakukan, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat RI dan pemerintah telah menyadarinya, tetapi belum merubah dan membuat hukum warisan Indonesia seperti hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam BW tersebut, ada dua macam cara untuk mendapatkan harta warisan pertama berdasarkan kanten-tuan undang-undang atau disebut "abintestate", dan kedua berdasarkan "testament" atau "wasiat". Hukum Warisan Perdata Barat (BW), mulanya hanya diberlakukan kepada orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa yang berada di Indonesia, kemudian diperluas orang-orang asing kecuali orang-orang Arab yang beragama Islam. Jadi hukum warisan perdata BW berlaku kepada orang-orang keturunan asing yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang China, Tailand, Jepang, dan lain-lain. Sedangkan orang asli Indonesia selain yang beragama Islam berlaku hukum Adat yang telah dijelaskan di muka. Adapun yang beragama Islam berlaku hukum warisan Islam. Sementara itu ada seperangkat asas-asas hukum warisan Islam dalam teks al-Quran dan al-Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian.¹⁵⁷

Berkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat, secara konseptual terdapat persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah sama-sama membicarakan tentang: 1) Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. 2) Asas bilateral dan asas individual. 3) Sistem individual. 4) Kedudukan dan menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama. 5) Harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun

¹⁵⁷*Ibid.*, h. 166-167.

harta bersama. Sedangkan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat adalah: 1) Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu disebut mengandung arti kewarisan apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. 2) Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas ijbāri dan asas kematian, sedangkan dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup. Di dalam hukum kewarisan Islam, dikenal asas keadilan berimbang (2 : 1), sedangkan dalam hukum kewarisan adat, dikenal asas musyawarah dan mufakat. 3) Di dalam hukum kewarisan Islam hanya dikenal sistem kewarisan secara *individual bilateral*.¹⁵⁸

Dari ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak selamanya berjalan beriringan. Para ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. Cristian van den Berg pernah mengeluarkan teorinya dengan *reception in complex* yang menyatakan bahwa hukum agama adalah hukum adat di mana hukum adat telah meresepsi hukum Islam. Teori ini kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronje dengan teori *receptie*. Teori ini menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah diterima oleh hukum Adat. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa 1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; 2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral; 3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlain-lainan. Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat

¹⁵⁸ Akhmad Haries, *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*, Jurnal Fenomena, Vol. 6, No. 2, 2014, h. 228.

berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (*judge made law*) yang agaknya berbeda adalah proses pelebagaan hukum waris Islam. Pelebagaan dan pengembangan hukum waris Islam ditempuh melalui legislasi nasional. Hal ini dapat disimak dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵⁹

Sementara itu, secara hipotesis dapat diketengahkan bahwa masyarakat adat hampir pasti menggunakan hukum waris adat. Tetapi persoalan bisa muncul, yakni apakah masyarakat adat yang beragama Islam mesti menggunakan hukum waris adat. Agaknya jawaban atas persoalan ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Diperlukan pengkajian dan penelitian yang cukup menantang untuk memetakan dan menjawab persoalan tersebut. Apakah lingkaran-lingkaran hukum adat (*rechtskringen*) dari van Vollenhoven memang masih hidup secara faktual? Perlu penelitian lebih lanjut. Bagi orang Islam, masalah penggunaan hukum waris tersebut lebih kompleks lagi, karena hukum yang ditujukan kepada mereka yang diciptakan melalui legislasi nasional ternyata tidak memberi kejelasan aturan hukum yang seharusnya untuk menyelesaikan masalah kewarisan. Hukum waris Islam bukan merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif bagi orang Islam. Ini berbeda dengan ketentuan perkawinan yang bersifat imperatif bagi orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian hukum waris Islam bagi orang Islam di Indonesia adalah bersifat fakultatif (*choice o flaw*) yang barang tentu di ranah faktual tidak sedikit yang berpaling darinya.¹⁶⁰

Sebagaimana halnya dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan dalam KHI tersebut juga bukan merupakan ketentuan yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh orang Islam dalam masalah pembagian warisan. KHI hanya merupakan pedoman saja (yang berarti dapat disimpangi) bagi orang atau instansi yang memerlukan. Hal ini dapat disimak

¹⁵⁹Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 70-71.

¹⁶⁰*Ibid.*, h. 69-70.

pada bagian Menimbang huruf b Inpres No. 1 Tahun 1991 yang berbunyi: “bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut”.²³ Jadi, hukum waris Islam digunakan atau tidak itu masalah pilihan yang mandiri bagi orang Islam.

Masyarakat Indonesia dipersilakan memilih hukum waris mana yang akan digunakan. Asal ada kesepakatan, orang bisa saja memilih hukum waris BW, hukum waris Islam atau hukum waris adat. Tapi masalahnya menjadi kompleks jika tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Jika demikian, maka masalahnya bisa menjadi panjang dan berlarut-larut yang tak berujung. Dalam situasi demikian itu barang tentu tidak dapat dihindari terjadi konflik kepentingan dari masing-masing pihak. Persoalan semakin melebar yang kemudian mengarah kepada konflik pemakaian hukum waris, yakni apakah hukum waris Islam yang akan dipakai, atau hukum waris adat, ataukah hukum waris BW. Kerumitan yang berawal dari konflik hukum demikian itu sudah saatnya untuk dicarikan jalan keluar. Ada dua kemungkinan cara penyelesaian masalah konflik hukum waris tersebut, yakni: (1) tetap membiarkan hukum waris dalam keberagaman dan manakala timbul konflik hukum kemudian diserahkan kepada pengadilan; atau (2) melakukan unifikasi dengan membuat suatu undang-undang baru di bidang kewarisan yang bersifat nasional.¹⁶¹

Dalam rangka mewujudkan kebersatuan bangsa salah satunya hanya dapat dicapai melalui unifikasi hukum. Ide untuk mempertahankan pluralitas hukum tentu saja tidak sejalan dengan cita-cita ‘hukum yang sama untuk semua orang’. Jika pluralitas hukum dipertahankan, tentu saja akan terjadi distorsi terhadap cita-cita persamaan hukum tersebut. Pada ranah yang lebih mendasar, tidak ada landasan konstitusional untuk membuat hukum yang berbeda-beda yang diterapkan bagi golongan-golongan penduduk yang berbeda

¹⁶¹*Ibid.*, h. 72-73.

pula. Jika dilihat lebih dalam, maka Konstitusi Indonesia tidak mengenal penggolong-golongan penduduk. Argumentasi untuk tetap mempertahankan hukum waris di Indonesia dalam keadaan beranekaragam ternyata lebih banyak mengandung konsekuensi negatif, sebab dengan tetap membiarkan keadaan itu terus berlangsung jelas bertentangan dengan cita-cita bangsa yang berkeinginan untuk memiliki hukum nasional (yang terunifikasi dan terkodifikasi) yang merupakan produk bangsa sendiri. Dengan pembiaran tersebut, hal ini juga berarti melestarikan terjadi konflik hukum antara ketiga sistem hukum waris tersebut yang sudah terjadi sejak masa penjajahan Belanda dan yang hingga kini terus berlangsung.¹⁶²

Upaya ke arah unifikasi dan kondifikasi hukum waris yang berlaku secara nasional seharusnya segera dimulai, di samping untuk menghindari konflik keluarga, memberikan kepastian hukum, juga sekaligus merupakan pembaruan terhadap hal-hal yang dianggap tidak adil dalam sistem hukum waris yang ada. Pola penyusunan hukum waris nasional yang akan datang dapat menggunakan pandangan Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound. Menurut Pound, hukum (tertulis) yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Rumusan yang demikian ini menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis (dari proses legislasi nasional) sebagai kebutuhan hukum masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Selaras dengan pandangan Pound, Eugen Ehrlich menekankan prinsip tentang pentingnya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat. Sejalan dengan pemaparan Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan acuan dalam penibagian waris di Indonesia, terdapat pembaruan yang cukup menonjol, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan

¹⁶²*Ibid.*, h. 72-73.

yang dikembangkan oleh Ahlussunnah. Cerminan asas bilateral dalam kompilasi hukum Islam adalah pasal 174 ayat 2 yang berbunyi: Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang tentang apakah anak perempuan dapat menghibah (menghalangi) saudara pewaris atau tidak. Sistem kewarisan yang dikembangkan Ahlussunnah menegaskan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat menghibah saudara pewaris.¹⁶³

Konsekuensi berikutnya dari diterimanya asas bilateral adalah dikenalnya pranata pembagian tempat (*plaatsvervulling*) dalam Kompilasi Hukum Islam. Sistem ini cenderung diadopsi dari sistem bilateral dalam hukum waris adat di Indonesia, yaitu dengan melihat pertalian darah dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua sisi keturunan sama-sama dianggap penting. Sistem ini juga yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing. Misalnya penguasaan harta dalam perkawinan, seperti harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974).¹⁶⁴

Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, selain sistem kewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat. 4) Dalam hukum Kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka urutan ahli waris adalah *ashab alfurud*, *'asabah*, dan *zawil arham*. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum daerah yang bersangkutan. 5) Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta asal maupun harta bersama. Sedangkan

¹⁶³*Ibid.*, h. 73-74.

¹⁶⁴*Ibid.*, h. 73-74.

dalam hukum kewarisan adat, harta warisan itu tidak sekedar harta benda saja, tetapi juga meliputi benda pusaka. Di samping itu, ada juga harta yang tidak dapat dibagi seperti harta peninggalan yang diwarisi oleh sekelompok orang atau sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, atau ditunda pembagiannya karena masih adanya ahli waris yang belum dewasa. *bilateral*. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, selain sistem kewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat. 4) Dalam hukum Kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka urutan ahli waris adalah *ashab alfurud*, *'asabah*, dan *zawil arham*. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum daerah yang bersangkutan. 5) Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta asal maupun harta bersama. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, harta warisan itu tidak sekedar harta benda saja, tetapi juga meliputi benda pusaka. Di samping itu, ada juga harta yang tidak dapat dibagi seperti harta peninggalan yang diwarisi oleh sekelompok orang atau sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, atau ditunda pembagiannya karena masih adanya ahli waris yang belum dewasa.¹⁶⁵

Berdasarkan analisis penulis di atas, keberlakuan hukum tradisi penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara mutlak memberlakukan teori otoritas hukum Islam dengan berlakunya hukum *faraid* kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi. Dengan adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta (*hifzul maal*) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode *islah* yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip *ta'abbudi* dalam konteks menjalankan hukum *faraid* yang juga

¹⁶⁵ Akhmad Haries, *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*, Jurnal Fenomena, Vol. 6, No. 2, 2014, h. 228.

bertujuan syariat (*maqashid syariah*) memelihara agama (*hifzul din*) kemudian menjalankan prinsip *ta'addulli* berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu kebiasaan menyelesaikan mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah keluarga untuk bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung atau *due procces dispute resolution kewarisan* (bahasa temuan fakta ilmiah) dengan kompromi penyelesaian sengketa waris. Sikap mental masyarakat tetap membagi harta secara Islam, kemudian harta digabung dengan nilai kemanusiaan (*humanis*)
2. Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara mutlak memberlakukan teori otoritas hukum Islam dengan berlakunya hukum *faraid* kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi. Adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta (*hifzul maal*) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta dengan metode *islah* yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip *ta'abbudi* dalam konteks menjalankan hukum *faraid* yang juga bertujuan syariat (*maqashid syariah*) memelihara agama (*hifzul din*) kemudian menjalankan prinsip *ta'aqqulli* berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) di masyarakat.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang beragama Islam hendaknya dalam penyelesaian sengketa kewarisan tunduk dan patuh terhadap hukum Islam dengan melakukan pembagian harta waris dengan ilmu *faraid*.
2. Bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa waris, hendaknya juga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, kebiasaan dan budaya yang berlaku di masyarakat.
3. Bagi para hakim, mediator, dan juru damai hendaknya dalam menyelesaikan sengketa kewarisan memperhatikan sistem hukum kewarisan yang berlaku, terutama hukum Islam bagi para pemeluknya, hukum adat di masyarakat dan hukum positif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Cet. 1.
- Abdul Wahid dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Abu Ahmad Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. VIII.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, cet. 1.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, Cet. 4.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Akhmad Haries, *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*, Jurnal Fenomena, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 4*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 1.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.
- Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, *Jurnal Wawasan Hukum Universitas Brawijaya Malang* Vol. 32, No. 1 Februari 2015.

- Asni Zubair, dkk., "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)", *Jurnal Al-Risalah*, Januari-Juni 2016.
- Asni Zubair, dkk., "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)", *Jurnal Al-Risalah*, Januari-Juni 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, *Kabupaten Katingan dalam Angka 2018*, Katingan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2018*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018.
- Bachtiar, Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Gender Berkeadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, t.th.
- Bahrudin, *Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Waris*, Malang: UIN Malang, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Beni Khaerani, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata)*, Malang: UIN Malang, 2011.
- Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, 2003, Jakarta: Pradnya Pramita, cet. Ke. 12.
- C. Snouck Horgronje, *De Atjehers*, 1893, jilid-1.
- Chairun Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minang*, Jakarta; Rineka Cipta, Cet-1, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 1208.
- Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Fatahuddin Azis Siregar, *Pembagian Harta Warisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jurnal Fitrah, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- <http://etheses.uin-malang.ac.id>.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>.
- <https://id.m.wikipedia.org>
- <https://jdih.katingankab.go.id>
- Ika Islamiatiningsih, *Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember*, Skripsi Malang: UIN-Malang, 2010.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015.
- Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015.
- Komari, *Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 3, November 2012.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Alih bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet. 1.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kukuy, 2009, *Informasi Umum dan Sejarah di Kalimantan Tengah*, <http://archive.kaskus.co.id/thread/1502872>.
- M Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh Madrasah Aliyah: Kelas Tiga*, Semarang: PT Karya Toha Putra, T.th.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Miftahul Arifin dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

- Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A. B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2003, Cet. 10.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, alih bahasa oleh Wahyudi Abdurrahman, Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Ibnu Majah Jilid 1*, alih bahasa Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, cet. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI-U3) 2017, ISBN 9-789-7936-499-93.
- Siti Muna Hayati, *Basuluh Suku Banjar dalam Sengketa Waris*, Alhukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01, Juni 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, Penerj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Syarif Dahlan dan Iwan Haryanto, *Eksistensi ADR dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No.2, Agustus 2018.
- Syekh Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim, *Fathul Mu'in*, Pdf., T.Td.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Tim Penyusus, *Hukum Waris*, alih bahasa oleh addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Zulfa Jamalie, "Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar, t.th.

**TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH**
(Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya)

HASIL PENELITIAN



Oleh:

H. SYAIKHU, MHI
Dr. IBNU ELMI A.S. PELU, SH, MH
JEFRY TARANTANG, S.Sy. SH, MH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
1439 H/2018 M